



**ANALISIS KINERJA KEUANGAN MENGGUNAKAN KONSEP
VALUE FOR MONEY PADA KEGIATAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Akuntansi*

Oleh

**FANISAH YULIYANDA
NIM. 18 402 00121**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKHALIHASANAHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2022**



**ANALISIS KINERJA KEUANGAN MENGGUNAKAN KONSEP
VALUE FOR MONEY PADA KEGIATAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

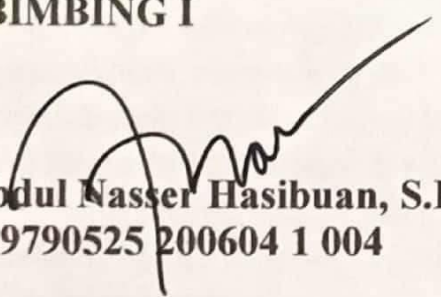
SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Akuntansi*

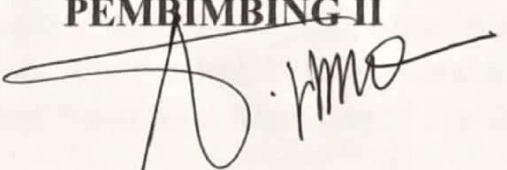
Oleh

**FANISAH YULIYANDA
NIM. 18 402 00121**

PEMBIMBING I


**Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si.
NIP. 19790525 200604 1 004**

PEMBIMBING II


**Arti Damisa, S.H.I., M.E.I.
NIDN. 2020128902**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKHALIHASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **FANISAH YULIYANDA**
Lampiran : 6 (Enam Eksemplar)

Padangsidimpuan, Agustus 2022
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

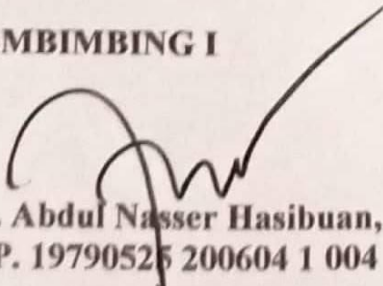
Setelah membaca, menelaah, dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **FANISAH YULIYANDA** yang berjudul "**Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Konsep *Value For Money* pada Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

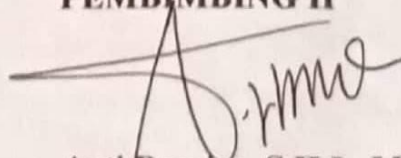
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si.
NIP. 19790525 200604 1 004

PEMBIMBING II


Arti Damisa, S.H.I., M.E.I.
NIDN. 2020128902

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FANISAH YULIYANDA

NIM : 18 402 00121

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi: Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Konsep *Value For Money* pada Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 05 Agustus 2022

Saya yang Menyatakan,



FANISAH YULIYANDA
NIM. 18 402 00121

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : FANISAH YULIYANDA

NIM : 18 402 00121

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Konsep *Value For Money* pada Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara”**. Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan

Pada tanggal : 05 Agustus 2022

Yang menyatakan,



FANISAH YULIYANDA

NIM. 18 402 00121



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website:uinsyahada.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : FANISAH YULIYANDA
NIM : 18 402 00121
FAKULTAS/PROGRAM STUDI : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
JUDUL SKRIPSI : Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Konsep *Value For Money* pada Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara

Ketua

Delima Sari Lubis, M.A
NIP. 19840512 201403 2 002

Sekretaris

Rini Hayati Lubis, M.P
NIP. 19870413 201903 2 011

Anggota

Delima Sari Lubis, M.A
NIP. 19840512 201403 2 002

Rini Hayati Lubis, M.P
NIP. 19870413 201903 2 011

Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd
NIP. 19830317 201801 2 001

Aliman Syahuri Zein, M.E.I
NIDN. 2028048201

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di

: Padangsidimpuan

Hari/Tanggal

: Rabu/ 07 Desember 2022

Pukul

: 13.00 WIB – Selesai

Hasil/Nilai

: Lulus / 82 (A)

Indeks Prestasi Kumulatif

: 3,73

Predikat

: Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Konsep
Value For Money pada Kegiatan Dinas Sosial
Kabupaten Padang Lawas Utara**
NAMA : FANISAH YULIYANDA
NIM : 18 402 00121

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas
dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Akuntansi

Padangsidimpuan, 19 Januari 2023

Dekan,



Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si.
NIP. 19780818 200901 1015

ABSTRAK

Nama : Fanisah Yuliyanda
NIM : 18 402 00121
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Konsep *Value For Money* pada Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara fokus terhadap pengelolaan *input*, namun masih kurang memperhatikan *output* dan *outcome*. Sehingga dibutuhkan pengukuran kinerja keuangan menggunakan *value for money*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja keuangan Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara pada program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, program perlindungan dan jaminan sosial, serta program rehabilitasi sosial tahun 2020-2021 diukur dari tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara pada program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, program perlindungan dan jaminan sosial, serta program rehabilitasi sosial tahun 2020-2021 diukur dari tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ilmu akuntansi sektor publik. Sehubungan dengan itu, pendekatan yang dilakukan adalah teori-teori terkait dengan kinerja keuangan, *value for money*, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan standar pelayanan minimal.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Peneliti menggunakan data sekunder berupa laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan data primer dengan menyebarkan angket. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, dokumentasi, dan angket. Data kemudian dianalisis menggunakan *value for money* yang terdiri dari tiga elemen yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Teknik pengambilan sampel menggunakan *sampling incidental* dengan pengambilan jumlah sampel sebanyak 123 responden, dan diuji dengan validitas dan reliabilitas guna mengukur keandalan data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengukuran kinerja keuangan menggunakan konsep *value for money* pada program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin tahun 2020-2021 masuk dalam kategori ekonomis dan efisiensi, namun belum mampu mencapai efektivitas yang baik. Kemudian pada program perlindungan dan jaminan sosial tahun 2020-2021 masuk dalam kategori ekonomis, dan pada tahun 2020 tergolong efisiensi berimbang, sedangkan pada tahun 2021 tergolong efisiensi, namun pada tahun 2020-2021 belum mencapai efektivitas yang baik. Pengukuran untuk program rehabilitasi sosial tahun 2020-2021 masuk dalam kategori ekonomis, dan pada tahun 2020 berjalan dengan efisiensi, namun pada tahun 2021 belum mampu mencapai efisiensi dengan baik, dan tahun 2020 belum mencapai efektivitas yang baik, sedangkan pada tahun 2021 masuk dalam kategori efektivitas berimbang.

Kata Kunci : Efektivitas, Efisiensi, Ekonomis, Kinerja Keuangan, *Value For Money*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Konsep *Value For Money* pada Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara”**. Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiannya dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, dan Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, serta Bapak Dr.

Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, dan Bapak Drs. H. Armyn Hasibuan, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, serta Ibu Dra. Hj. Replita, M.Si., Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Delima Sari Lubis, M.A., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, dan Ibu Rini Hayati Lubis, M.P, selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., selaku pembimbing I, dan Ibu Arti Damisa, S.H.I., M.E.I., selaku pembimbing II yang sudah menyediakan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu dosen beserta staf di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses perkuliahan.

6. Bapak Ongku Bangsawan Hasyim Harahap, S.Sos beserta staf di lingkungan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara yang telah menerima peneliti untuk melaksanakan penelitian di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara.
7. Teristimewa kepada Ayahanda Alm. Aswir Harahap dan Ibunda Nursaima Siregar tercinta yang telah memberikan curahan kasih sayang dan do'a yang tiada hentinya serta memberikan dukungan moril dan materil demi kesuksesan. Beserta Kakak Apriyanita Puspasari, Abang Ibnu Hakiki, dan keluarga lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut mendo'akan serta memberikan dukungan selama proses perkuliahan.
8. Sahabat-sahabat peneliti yaitu, Nur Amanah Bunda, Eva Riskiah, Efrilisa Asnuna Hasibuan, Afifah Ramadhani, Safika Zebua, Nisa Rahmadhani, Nanta Ramadhani, dan sahabat-sahabat yang tidak dapat saya sebutkan semuanya, yang selalu membantu, memberikan dukungan serta semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman Akuntansi 1 angkatan 2018 yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan.
10. Teman-teman KKL, magang, dan temen-teman seperjuangan lainnya yang telah memberikan dukungan dan do'a kepada peneliti.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Semoga Allah senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah membantu dan mendukung peneliti. Peneliti juga menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti, sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan mengingat keterbatasan, kemampuan, dan pengalaman peneliti. Oleh karenanya peneliti sangat mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, 05 Agustus 2022

Peneliti,

Fanisah Yuliyanda

NIM. 18 402 00121

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

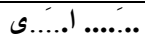
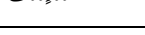
- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

- a. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.

- b. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara *katasandang* yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*.

Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Batasan Masalah	9
D. Defenisi Operasional	10
E. Rumusan Masalah.....	11
F. Tujuan Penelitian	11
G. Kegunaan Penelitian	12
H. Sistematika Pembahasan	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori	14
1. Kinerja Keuangan.....	14
a. Pengertian Kinerja Keuangan	14
b. Pengukuran Kinerja Keuangan	15
c. Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan	17
2. <i>Value For Money</i>	18
a. Konsep <i>Value For Money</i>	18
b. Manfaat <i>Value For Money</i>	24
c. Indikator <i>Value For Money</i>	25
d. Langkah-Langkah Pengukuran <i>Value For Money</i>	27
3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	29
a. Pengertian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	29

b. Manfaat Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	31
c. Format Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	32
4. Standar Pelayanan Minimal	35
a. Pengertian Standar Pelayanan Minimal	35
b. Tujuan Standar Pelayanan Minimal	37
B. Penelitian Terdahulu	38

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian	42
B. Jenis Penelitian	42
C. Populasi dan Sampel	43
1. Populasi	43
2. Sampel	43
D. Sumber Data	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
1. Wawancara	46
2. Dokumentasi.....	46
3. Angket	47
F. Uji Validitas dan Reliabilitas	49
1. Uji Validitas.....	49
2. Uji Reliabilitas.....	49
G. Teknik Analisis Data	50

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	55
1. Sejarah Singkat Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara	55
2. Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara	56
3. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara	57
4. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara	60
B. Hasil Analisis	61
1. Uji Validitas dan Reliabilitas	61
2. <i>Value For Money</i>	65
C. Pembahasan Hasil Penelitian	83
D. Keterbatasan Penelitian	87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan Program	5
Tabel I.2	Target Capaian Kinerja	6
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu	38
Tabel III.1	Kisi-Kisi Angket Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	47
Tabel III.2	Kisi-Kisi Angket Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	48
Tabel III.3	Kisi-Kisi Angket Program Rehabilitasi Sosial	48
Tabel III.4	Penetapan Skor Atas Jawaban Kuisisioner	49
Tabel III.5	Penentuan Klasifikasi Intensitas Metode B	53
Tabel IV.1	Hasil Uji Validitas Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	62
Tabel IV.2	Hasil Uji Validitas Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	62
Tabel IV.3	Hasil Uji Validitas Program Rehabilitasi Sosial	63
Tabel IV.4	Hasil Uji Reliabilitas untuk Setiap Program Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara	64
Tabel IV.5	Realisasi Anggaran Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	66
Tabel IV.6	Pencapaian Kinerja Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	68
Tabel IV.7	Interval Kepuasan Masyarakat	70
Tabel IV.8	Realisasi Anggaran Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	72
Tabel IV.9	Pencapaian Kinerja Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	73
Tabel IV.10	Interval Kepuasan Masyarakat	76
Tabel IV.11	Realisasi Anggaran Program Rehabilitasi Sosial	77
Tabel IV.12	Pencapaian Kinerja Program Rehabilitasi Sosial	79
Tabel IV.13	Interval Kepuasan Masyarakat	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1	Struktur Organisasi	57
-------------	---------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor publik merupakan organisasi yang kegiatannya menghasilkan barang dan jasa dalam rangka memenuhi hak dan kebutuhan publik. Tujuan utama sektor publik adalah memberikan pelayanan dan menyediakan kebutuhan masyarakat, sedangkan tujuan finansial sektor publik yaitu memaksimalkan anggaran untuk kegiatan pelayanan publik.¹ Sektor publik yang bertanggung jawab dalam membantu urusan pemerintah dengan memberikan pelayanan yang meningkatkan kesejahteraan sosial merupakan tugas dari dinas sosial.² Dalam pelaksanaan kegiatan dinas sosial membutuhkan anggaran yang menghubungkan kinerja dengan tujuan yang sudah direncanakan. Pelaksanaan anggaran dinas sosial lebih dominan menggunakan komponen belanja yang digunakan untuk menerapkan program kesejahteraan sosial dan diperoleh melalui penganggaran.³

Tahap penyusunan anggaran yang berbasis kinerja dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas pelaporan pelaksanaan kegiatan. Anggaran yang digunakan untuk membiayai kebutuhan publik berasal dari dana masyarakat, maka dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan dibutuhkan penyusunan strategi yang baik dan sesuai

¹Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2018), hlm. 2-11.

²M. Ramadhani, dkk. "Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Banjarmasin," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 11, 2016, hlm. 949.

³Marsella Lasut, "Evaluasi Pelaksanaan Sistem Akuntansi Belanja pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan Sesuai PP No 71 Tahun 2010," *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 12, No. 2, 2017, hlm. 150.

dengan standar pelayanan minimal.⁴ Pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan minimal dijadikan sebagai pegangan dalam memberikan ukuran dan aturan pelayanan yang ditetapkan pemerintah.⁵

Kemampuan kinerja sektor publik dilihat dari penggunaan uang publik dalam membiayai kegiatan yang mengutamakan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kinerja keuangan sangat penting untuk dibahas dalam sektor publik sejak adanya penganggaran berbasis kinerja yang menghasilkan kinerja keuangan pemerintahan.⁶ Mekanisme pengkajian penyelenggaraan dana publik dijelaskan dalam akuntansi sektor publik, yaitu sebagai teknik analisis dalam pengelolaan anggaran dan akan dipertanggungjawabkan atas pelaporan transaksi keuangan publik. Akuntansi sektor publik menghasilkan laporan keuangan yang digunakan sebagai informasi bagi pengguna untuk pengambilan keputusan dan evaluasi peningkatan kinerja.⁷

Penyajian laporan keuangan harus mengikuti standar akuntansi pemerintah yang mewakili persetujuan semua golongan, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pembuatan laporan keuangan yang wajar, jelas, dan lengkap untuk menciptakan nilai transparansi.⁸ Laporan keuangan harus dipenuhi, salah satunya dengan menyajikan laporan realisasi anggaran

⁴Meriyatus Sofiani dan Endang Dwi Retnani, "Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Surabaya," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 8, No. 11, November 2019, hlm. 2.

⁵Habib Muhsin Syafingi, "Konstitusionalitas Standar Pelayanan Minimal," *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 8, No. 2, Agustus 2017, hlm. 217-218.

⁶Abdul Hamid dan Ilyas Lamuda, "Evaluasi Kinerja Keuangan Melalui Pendekatan Value For Money Gorontalo," *Accounting Journal*, Vol. 02, No. 1, April 2019, hlm. 32.

⁷Putri Ariella Belinda dan Nevi Costari, "Pentingnya Implementasi Akuntansi Sektor Publik dalam Suatu Instansi Pemerintahan," *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 59-61.

⁸Abdul Nasser Hasibuan, dkk, *Akuntansi Keuangan Menengah* (Jakarta: Kencana, Desember 2020), hlm. 10.

yang menjelaskan pengalokasian anggaran dalam satu periode pelaporan.⁹ Laporan realisasi anggaran dimuat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), sebagai bentuk akuntabilitas dari penggunaan anggaran dan pelaksanaan tugas suatu instansi.¹⁰

Pengelolaan anggaran yang disajikan dalam laporan keuangan perlu diukur untuk menilai tingkat kemampuan dalam menggunakan anggaran. Salah satu pengukuran kinerja keuangan sektor publik yaitu menggunakan *value for money*. Konsep *Value for money* merupakan pengelolaan dan pengukuran sektor publik yang mengutamakan tiga bagian utama penting, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dalam memberikan pelayanan berdasarkan sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam pelayanan publik dan untuk membantu memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.¹¹ Konsep *value for money* merupakan konsep penting dalam sektor publik, sehingga disebut inti dari pengukuran kinerja sektor publik. Sistem pengukuran dilakukan dengan informasi akuntansi yang dilakukan dengan alat ukur yang bersifat *financial* dan *non-financial*. Maka pengukuran konsep *value for money* menekankan keseimbangan antara kinerja keuangan dan kinerja non keuangan. Pengukuran *value for money* dari segi ekonomis digunakan untuk mengetahui kemampuan dalam mengalokasikan sumber daya dengan baik,

⁹Nunuy Nur Afiah, dkk, *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual pada Entitas Akuntansi* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 28.

¹⁰Zaenal Mukarom dan Muhibudin Wijaya Laksana, *Membangun Kinerja Pelayanan Publik Menuju Clean Government and Good Governance* (Bandung: Pustaka Setia, Februari 2016), hlm. 214.

¹¹Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, hlm. 151-160.

dan pengukuran efisiensi dilakukan untuk mengetahui kemampuan dalam menghasilkan nilai guna dari penggunaan *input*, sedangkan pengukuran efektivitas dilakukan untuk mengetahui keberhasilan kinerja yang dicapai.¹²

Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan organisasi sektor publik yang membantu urusan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial, serta rehabilitasi sosial. Program kegiatan yang sudah dibuat, diharapkan mampu membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Namun pada kenyataannya masih banyak terdapat masalah sosial yang belum sepenuhnya dapat teratasi, yaitu peningkatan kemiskinan pada masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara. Menurut data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin mencapai 26.790 jiwa, kemudian terjadi peningkatan kemiskinan pada tahun 2021 yaitu mencapai 28.370 jiwa. Penanganan masalah sosial bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan, karena dalam mengatasi masalah sosial sering terjadi beberapa hambatan, yaitu kesalahan dalam penyaluran dana sosial dan program yang diberikan pemerintah tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.¹³

Menurut Mardiasmo apabila terjadi peningkatan biaya, harus diiringi dengan peningkatan manfaat yang lebih besar.¹⁴ Dalam pelaksanaan program

¹²Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, *Teori Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik dari Anggaran hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah hingga Tempat Ibadah* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 132.

¹³Teresia Antikapuspa Wardhani, *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pendekatan Value For Money* (Skripsi, Universitas Sanata Dharma, 2017), hlm. 1.

¹⁴Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, hlm. 165.

Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara membutuhkan anggaran. Berikut tabel pengalokasian anggaran sesuai dengan kegiatan program Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara.

Tabel I.1
Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan Program

No.	Program	2020		2021	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Rp 412.404.600	Rp 375.512.600	Rp 293.297.200	Rp 275.323.200
2	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 150.089.500	Rp 143.830.700	Rp 453.369.800	Rp 414.400.800
3	Program Rehabilitasi Sosial	Rp 516.230.000	Rp 481.477.200	Rp 200.444.200	Rp 196.701.100

Sumber: Laporan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara

Berdasarkan tabel I.1, Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2020 dan 2021 mendapatkan anggaran yang digunakan untuk menjalankan program-program yang diharapkan dapat menyentuh masyarakat. Pelaksanaan kegiatan dinas sosial pada tahun 2020 untuk program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin memiliki sisa lebih anggaran sebesar Rp 36.892.000, dan tahun 2021 sebesar Rp 17.974.000. Kemudian untuk program perlindungan dan jaminan sosial pada tahun 2020 memiliki sisa lebih anggaran sebesar Rp 6.258.800, dan tahun 2021 sebesar Rp 38.969.000. Program rehabilitasi sosial pada tahun 2020 memiliki sisa lebih anggaran sebesar Rp 34.752.800, dan pada tahun 2021 sebesar Rp 3.743.100. Apabila dihitung secara keseluruhan anggaran untuk pelaksanaan program yang dirasakan masyarakat secara langsung pada tahun

2020 yaitu Rp 1.000.820.500, dan pada tahun 2021 sebesar Rp 886.425.100 dari anggaran yang tersedia.

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial disusun sesuai dengan SPM, yang diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan target capaian kinerja. Berikut capaian kinerja yang dijelaskan dalam LKPJ Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2020 dan 2021.

Tabel I.2
Target Capaian Kinerja

No.	Program	2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	100%	100%	100%	100%
2	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%	96%	100%	94%
3	Program Rehabilitasi Sosial	100%	96%	100%	73%

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara

Berdasarkan tabel I.2 capaian kinerja pada tahun 2020 dan 2021 untuk program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin dapat terlaksana secara keseluruhan, sehingga semua kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai target. Sedangkan pada program perlindungan dan jaminan sosial di tahun 2020, terdapat 4% kegiatan yang tidak mencapai target, dan pada tahun 2021 terdapat 6% kegiatan yang tidak terlaksana. Kemudian pada program rehabilitasi sosial tahun 2020 terdapat 4% kegiatan yang tidak terlaksana, dan tahun 2021 terdapat 27% kegiatan yang tidak mencapai target.

Faktor penyebab beberapa kegiatan belum memenuhi target secara keseluruhan, dikarenakan beberapa keadaan yang kurang mendukung, seperti masih kurangnya anggaran untuk melaksanakan kegiatan serta kesalahan

dalam memprediksi. Keadaan ini menunjukkan bahwa tidak selamanya semua kegiatan dapat terprediksi sesuai target. Maka dinas sosial dituntut harus membuat strategi dalam mengelola keuangannya dan mengutamakan penerapan kegiatan yang paling utama, karena keberhasilan dari kegiatan juga dilihat dari kepuasan masyarakat.¹⁵

Berdasarkan wawancara dengan beberapa masyarakat penerima bantuan Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara, yaitu dengan Ibu Tiarona mengatakan bahwa bantuan yang diberikan tidak memberikan dampak pada peningkatan maupun penurunan pendapatannya, dikarenakan bantuan hanya dapat memenuhi kebutuhan pokok dalam jangka waktu kurang lebih satu minggu, sedangkan bantuan yang diterima tidak menentu kapan datangnya.¹⁶ Menurut Ibu Nurhamida selaku penerima bantuan juga mengatakan bahwa bantuan yang diberikan tidak memberikan dampak terhadap pendapatannya.¹⁷

Penyebab pendapatan masyarakat penerima bantuan sosial Kabupaten Padang Lawas Utara tidak mengalami peningkatan, dikarenakan masyarakat belum bisa mengelola bantuan tersebut dengan baik. Menurut Bapak Ongku Bangsawan selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara, mengatakan bahwa program yang dapat meningkatkan dunia usaha dan mempengaruhi pendapatan ada pada program Kelompok Usaha Bersama

¹⁵Laporan Indikator Belanja Langsung Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021.

¹⁶Tiarona, Wawancara dengan Masyarakat Penerima Bantuan Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara, 5 Desember 2021, pukul 14.00 WIB.

¹⁷Nurhamida, Wawancara dengan Masyarakat Penerima Bantuan Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara, 5 Desember 2021, pukul 09.00 WIB.

(KUBE). Program ini mengajak masyarakat untuk mengembangkan keahlian dalam mendirikan usaha. Namun kegiatan ini tidak diterapkan untuk tahun 2021, karena anggaran yang diberikan belum mencukupi untuk menjalankan kegiatan ini.¹⁸

Teresia Atikapuspa Wardhani dalam penelitiannya menyatakan bahwa program pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial dan program pemberdayaan fakir miskin, digolongkan sangat ekonomis dan sangat efisiensi. Namun, dari segi efektivitas menghasilkan tingkat yang bervariasi, yaitu masuk dalam kategori efektif dan cukup efektif.¹⁹

Nur Zeni Amilia Putri dalam penelitiannya menyatakan bahwa kinerja keuangan yang dihitung secara keseluruhan tergolong efisiensi dan ekonomis, namun masih tergolong belum efektif.²⁰

Berdasarkan fenomena di atas, maka perlu dilakukan pengukuran terhadap kinerja keuangan menggunakan konsep *value for money*. Pengukuran dilakukan untuk mengetahui pengelolaan keuangan dalam menjalankan kegiatan yang sudah ditentukan. Maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai **“Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Konsep *Value For Money* pada Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara”**.

¹⁸Ongku Bangsawan, Wawancara dengan Kepala Dinas Sosial di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara, 6 Desember 2021, pukul 09.00 WIB.

¹⁹Teresia Atikapuspa Wardhani, “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pendekatan Value For Money”, hlm. 87.

²⁰Nur Zeni Amilia Putri, “Analisis Value For Money pada Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur”, (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020), hlm. 101.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian ini, maka dapat diketahui beberapa masalah yang muncul pada program kerja Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara, sehingga dapat diperoleh identifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Terdapat beberapa sub kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara yang belum mencapai target, yaitu pada program perlindungan dan jaminan sosial serta program rehabilitasi sosial tahun 2020 dan 2021.
2. Anggaran yang masuk pada Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara tidak sepenuhnya dapat direalisasikan, hal ini dilihat berdasarkan laporan realisasi anggaran tahun 2020 dan 2021.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah akan memudahkan peneliti dalam memahami pembahasan dari permasalahan dan sasaran yang dituju, sehingga terhindar dari pembahasan yang melenceng. Dengan demikian pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada tiga program yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara, yaitu program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, program perlindungan dan jaminan sosial, dan program rehabilitasi sosial. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur kinerja dari tiga program tersebut, yaitu diukur dari segi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas menggunakan konsep *value for money*.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan dari suatu konsep penelitian yang dijadikan acuan dalam penelitian. Maka untuk menghindari kesalahpahaman untuk menelaah kata-kata dalam judul penelitian ini, dibutuhkan beberapa kata kunci yang harus dipahami, yaitu diantaranya:

1. Kinerja Keuangan adalah hasil yang menggambarkan kemampuan suatu instansi dalam mengelola dana yang disajikan dalam laporan keuangan.²¹
2. Konsep *Value For Money* adalah pengelolaan dan pengukuran kinerja sektor publik yang berdasarkan tiga pokok penting, yaitu:
 - a. Ekonomis merupakan penggunaan anggaran dengan kuantitas nilai uang yang layak.
 - b. Efisiensi merupakan mencapai *output* yang maksimal dengan penggunaan sumber daya yang minim.
 - c. Efektivitas merupakan ukuran dari hasil kegiatan yang dicapai dengan hasil yang sudah ditetapkan.²²
3. Dinas Sosial adalah sektor publik yang membantu urusan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.²³

²¹Francis Hutabarat, *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan*, (Banten: Desanta Muliavisitama, 2020), hlm. 1–2.

²²Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, hlm. 5.

²³M. Ramadhani, dkk. “Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Banjarmasin,” hlm. 949 .

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, diperoleh rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara pada program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin tahun 2020-2021 ditinjau dari tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas?
2. Bagaimana kinerja keuangan Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara pada program perlindungan dan jaminan sosial tahun 2020-2021 ditinjau dari tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas?
3. Bagaimana kinerja keuangan Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara pada program rehabilitasi sosial tahun 2020-2021 ditinjau dari tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat ditetapkan tujuan dalam melakukan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara pada program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin tahun 2020-2021 ditinjau dari tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.
2. Untuk mengetahui kinerja keuangan Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara pada program perlindungan dan jaminan sosial tahun 2020-2021 ditinjau dari tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

3. Untuk mengetahui kinerja keuangan Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara pada program rehabilitasi sosial tahun 2020-2021 ditinjau dari tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

G. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini berguna bagi peneliti untuk mengimplementasikan teori ilmu yang sudah diperoleh saat kuliah, dan bisa dijadikan referensi untuk memperdalam pemahaman tentang pengukuran kinerja keuangan dinas sosial dengan konsep *value for money*.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan motivasi bagi pihak dinas sosial dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan kinerja keuangan yang sesuai tujuan.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi pembaca, yaitu untuk memperoleh informasi dan ilmu yang bisa dijadikan referensi jika ingin melakukan penelitian berkaitan dengan pengukuran kinerja sektor publik menggunakan konsep *value for money*.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam memperoleh pembahasan yang sistematis, perlu menyusun sistematika penulisan sedemikian rupa. Sehingga memudahkan peneliti dalam

melakukan penyusunan proposal yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematikanya yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah mengenai hal yang melatarbelakangi peneliti melakukan penelitian terhadap judul peneliti, dan didukung dengan bagian lainnya seperti identifikasi masalah, batasan masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, berisi tentang kerangka teori membahas teori yang mendukung permasalahan yang dikaji dan berisi tentang penelitian terdahulu, yaitu mengenai penelitian yang memiliki kesamaan dan perbedaan dari masalah yang diteliti dengan penelitian lain.

Bab III Metodologi Penelitian, berisi tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, sumber data, instrumen pengumpulan data, dan uji validitas dan reliabilitas, serta teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian, berisi gambaran umum lokasi penelitian, pembahasan mengenai hasil penelitian menggunakan analisis mengenai kaitan program dinas sosial dalam menjalankan kegiatannya dilihat dari segi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan yang merupakan akhir dari hasil penelitian, dan saran yang bisa membantu perbaikan terhadap peneliti selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Kinerja Keuangan

a. Pengertian Kinerja Keuangan

Menurut Wibowo kinerja berasal dari pengertian *performance*, yang berarti prestasi kerja atau hasil bekerja. Namun, pengertian kinerja memiliki makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja saja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung.²⁴ Pengertian kinerja secara menyeluruh adalah hasil kerja secara kuantitas dan kualitas yang dicapai oleh karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan moral dan tidak melanggar hukum.²⁵

Menurut Francis kinerja keuangan adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui perkembangan suatu instansi dalam mengelola keuangan sesuai dengan aturan yang baik dan benar. Apabila instansi mampu mencapai tujuan sesuai rencana, maka instansi tersebut dapat dinilai memiliki kinerja yang baik. Perusahaan yang tidak mampu dalam mencapai tujuan, perlu melakukan analisis terhadap kinerja keuangan, sehingga dapat mengetahui langkah-langkah yang akan dilakukan dalam perbaikan kinerja. Penilaian kualitas kinerja yang baik dapat dilihat dari penggunaan keuangan yang sesuai aturan, dan

²⁴Surajiyo, dkk. *Penelitian Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 8.

²⁵Abdul Nasser Hasibuan, dkk. "Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan," *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 2, Desember 2019, hlm. 131.

akan disajikan dalam laporan keuangan untuk mengetahui kondisi keuangan.²⁶

Kinerja keuangan menjelaskan tujuan dan target yang menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan indikator keuangan. Suatu kinerja keuangan akan dikatakan baik, apabila sudah sesuai dengan hukum, kewajaran, transparan, dan akuntabilitas. Sehingga akan menumbuhkan kepercayaan publik dan semakin termotivasi dalam meningkatkan kinerja.²⁷ Kinerja keuangan disajikan dalam laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang menggunakan anggaran. Penerapan kinerja keuangan yang bernilai transparan dan akuntabilitas diharapkan mampu mengurangi kebocoran dana, pemborosan, dan menemukan kegiatan yang tidak pantas dilakukan secara ekonomis.²⁸

b. Pengukuran Kinerja Keuangan

Pengukuran kinerja keuangan merupakan kegiatan yang sangat penting untuk mengetahui ukuran keberhasilan suatu instansi, dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam meningkatkan kinerja di masa mendatang.²⁹ Data keuangan dijadikan sebagai bahan pengukuran kinerja, yaitu dengan cara menganalisis dan menghitung data

²⁶Francis Hutabarat, *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan*, hlm. 1–2.

²⁷Handoko A. Hasthoro dan Sunardi, “Tata Kelola Publik dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 19, No. 1, April 2016, hlm. 56–58.

²⁸Isna Ardila dan Ayu Anindya Putri, “Analisis Kinerja Keuangan dengan Pendekatan Value For Money pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi,” *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 15, No. 1, Maret 2015, hlm. 78.

²⁹Ali Mutasowifin, *Intisari Analisis Kinerja Keuangan* (Bogor: Mahameru Publishing House, 2014), hlm. 5.

keuangan tersebut. Hasil dari pengukuran kinerja keuangan dapat memberikan solusi ketika terjadinya suatu peristiwa pada periode tertentu yang berkaitan dengan keuangan. Pengukuran kinerja dapat dilakukan melalui beberapa alat ukur yang sesuai dengan keadaan dan tujuan instansi tersebut.³⁰ Sistem pengukuran kinerja keuangan dilakukan dengan alat ukur yang bersifat *financial* dan *non-financial*, yaitu menggunakan indikator dari segi *input*, *output*, dan *outcome*.

Kegiatan pengukuran kinerja keuangan dilakukan untuk menilai kemampuan akuntabilitas suatu instansi dalam menjalankan kinerjanya. Akuntabilitas bukan hanya menunjukkan kemampuan dalam membelanjakan anggaran, akan tetapi dilihat dari pengelolaan anggaran yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Setiap instansi dituntut untuk memiliki keahlian dalam mengatur keuangan agar mampu membiayai semua kegiatan. Pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian dalam menentukan imbalan penghargaan atau hukuman dari suatu kinerja.³¹

Al-Qur'an menjelaskan bahwa setiap yang dikerjakan akan mendapatkan balasan setimpal. Pekerjaan yang diiringi dengan syariat akan memperoleh sesuatu yang baik, sebab Allah menilai dari setiap yang dilakukan hambanya. Setiap orang yang mau berikhtiar dan produktif dalam melakukan suatu pekerjaan, maka berhak mendapat

³⁰Hery, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), hlm. 29.

³¹Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, hlm. 151-160.

imbalan atas usaha yang telah dilakukan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Najm ayat 39 yang berbunyi:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya: Dan setiap manusia memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan dan Allah mencukupkan imbalan amal perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan.³²

Berdasarkan tafsir Al-Misbah, ayat ini menjelaskan bahwa seseorang tidak akan memikul amalan baik atau kemudharatan yang dilakukan orang lain. Manusia tidak akan mendapatkan selain apa yang sudah diusahakannya, dan usaha yang baik atau buruk tidak akan dilenyapkan Allah. Namun kelak akan diperlihatkan kepadanya seluruh perbuatan yang pernah dilakukan, sehingga dirinya akan mendapatkan imbalan sesuai dengan perbuatannya.³³

c. Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan

Setiap uang yang dibelanjakan dalam pelaksanaan kegiatan harus jelas hasil dan kegunaannya. Maka untuk mengetahui hal tersebut, dibutuhkan pengukuran kinerja keuangan. Hasil pengukuran kinerja keuangan akan memberikan informasi dalam pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan kinerja. Menurut Mardiasmo manfaat pengukuran kinerja keuangan, antara lain:

³²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf An-Nur Al-Qur'anul Karim* (Jakarta Timur: Maktabah Al-Fatih, 2015), hlm. 527.

³³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 13 (Pisangan Ciputat: Lentera Hati, 2012), hlm. 205.

- 1) Memastikan pengambilan keputusan dilakukan secara benar.
- 2) Alat komunikasi antara atasan dan bawahan dalam memperbaiki kinerja.
- 3) Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan atau hukuman atas pencapaian kinerja yang sudah diukur.
- 4) Memberikan arah dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
- 5) Mengevaluasi dan membandingkan pencapaian kinerja, sehingga mengetahui perbaikan kinerja yang akan dilakukan.³⁴

Menurut Kasmir manfaat pengukuran kinerja keuangan, diantaranya:

- 1) Mengetahui posisi keuangan maupun hasil kinerja yang sudah dicapai selama beberapa periode.
- 2) Mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh instansi
- 3) Digunakan sebagai pembandingan terhadap hasil yang telah dicapai.
- 4) Mengetahui apa saja yang dibutuhkan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.
- 5) Mengetahui langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan di masa mendatang yang berhubungan dengan keadaan keuangan.³⁵

2. Value For Money

a. Konsep Value For Money

Menurut Mardiasmo *value for money* adalah konsep pengelolaan dan pengukuran organisasi sektor publik yang mengandung tiga

³⁴Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, hlm. 153.

³⁵Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 68.

elemen, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas yang saling berkaitan satu sama lainnya. Penerapan konsep *value for money* pada sektor publik harus dilakukan seiring dengan meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik dalam memperbaiki kinerja.³⁶ Setiap sektor publik diharapkan mampu mempertanggungjawabkan kegiatan sesuai dengan konsep *value for money*, yaitu ekonomis (hemat) dalam mengalokasikan sumber daya, efisiensi (berdaya guna) dalam mencapai *output* yang maksimal dengan sumber daya yang minim, serta efektivitas (berhasil guna) dalam mencapai tujuan.³⁷

Konsep *value for money* merupakan inti dari pengukuran kinerja sektor publik. *Value for money* mengandung arti sebagai penghargaan terhadap nilai uang, yang mana setiap rupiah harus digunakan sebagaimana mestinya. Penerapan konsep *value for money* harus dapat diketahui tingkat capaian kinerja agar bisa dibandingkan dengan target kinerja. Begitu juga dengan pengelolaan kinerja keuangan yang harus seimbang dengan kinerja non keuangan, yaitu antara hasil dan proses.³⁸

Suatu kegiatan yang dikatakan ekonomis apabila dapat mengurangi biaya yang tidak perlu, sehingga menggunakan anggaran

³⁶Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, hlm. 5-8.

³⁷Gabriela Thalia wuwungan, dkk, "Penerapan Metode Value For Money Sebagai Tolak Ukur Penilaian Kinerja Keuangan pada Organisasi Sektor Publik di Dinas Kesehatan Kota Manado," *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 14, No. 4, 2019, hlm. 355–356.

³⁸Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, *Teori Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik dari Anggaran hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah hingga Tempat Ibadah*, hlm. 132.

dengan hemat dan terhindar dari pemborosan.³⁹ Sebagaimana dalam Islam juga melarang untuk melakukan pemborosan, yaitu membelanjakan harta dengan cara berlebih-lebihan. Dalam Al-Qur'an boros disebut dengan perbuatan buruk. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Isra' ayat 26-27 yang berbunyi:

وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا
تُبْذِرْ تَبْذِيرًا ۚ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ
وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: Dan berikanlah pada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara syaitan, dan syaitan sangat ingkar pada Tuhannya.⁴⁰

Tafsir ayat di atas Menurut M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa memberikan hak berupa bantuan dalam bentuk materi maupun immateri, hubungan baik, dan kebajikan kepada keluarga, orang miskin, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Menghamburkan harta secara boros sangat dilarang, karena itu merupakan perbuatan yang tidak akan mendatangkan kemaslahatan. Setiap manusia yang menghamburkan harta bukan pada tempatnya merupakan saudara

³⁹Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, hlm. 5.

⁴⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf An-Nur Al-Qur'anul Karim*, hlm. 284.

setan yang sifatnya sama dengan setan, sebab setan sangat ingkar pada Tuhan.⁴¹

Efisiensi merupakan kemampuan menjalankan tugas dalam memberikan nilai manfaat yang dicapai dengan baik dan terhindar dari pemborosan.⁴² Islam mengajarkan pada umatnya untuk bekerja dengan baik dan sesuai syariat untuk menjamin kebaikan bersama dengan menjauhi sifat materialistis yang hanya mengejar dunia tanpa memikirkan akhirat. Pekerjaan sesuai syariat akan mendapatkan kinerja yang baik dan Allah menilai setiap yang dilakukan hambanya sesuai firman Allah dalam QS. At-Taubah ayat 105 yang berbunyi:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ
وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: Dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberikan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.⁴³

Berdasarkan tafsir Al-Misbah, ayat ini menjelaskan bahwa bekerjalah karena Allah dengan amal yang baik dan bermanfaat untuk dirimu maupun masyarakat umum. Maka Allah yang akan menilai dan

⁴¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 451.

⁴²Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, hlm. 5.

⁴³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf An-Nur Al-Qur'anul Karim*, hlm. 203.

memberi ganjaran, dan Rasul serta orang-orang mukmin akan melihat dan menilainya juga. Kemudian menyesuaikan perlakuan dengan amal yang akan dikembalikan melalui kematian. Setiap perbuatan akan diberikan imbalan, dan Allah maha mengetahui segalanya.⁴⁴

Selanjutnya mengenai efektivitas yaitu ukuran keberhasilan dari kegiatan yang dicapai dengan tujuan yang sudah direncanakan.⁴⁵ Sedangkan dalam Islam efektivitas berhubungan dengan kebaikan dan bersungguh-sungguh dalam bekerja. Hendaknya seorang Muslim melakukan kebaikan yang diiringi dengan kesungguhan dalam melakukannya. Keberhasilan suatu kinerja sektor publik dapat dinilai oleh masyarakat, karena tujuan dari sektor publik yaitu memberikan pelayanan publik guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam memberikan pelayanan publik dibutuhkan kinerja yang baik. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Asy-Syu'ara ayat 181-183 yang berbunyi:

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴾ ﴿ ١٨١ ﴾ وَزِنُوا
بِالْقِسَاطِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿ ١٨٢ ﴾ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ
أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعَثُوا فِي الْأَرْضِ مُمْسِدِينَ ﴿ ١٨٣ ﴾

Artinya: Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-

⁴⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 5 (Cilandak Timur: Lentera Hati, 2002), hlm. 670.

⁴⁵Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, hlm. 5.

haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.⁴⁶

Menurut M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa Nabi Syu'aib menasihati kaumnya untuk menyempurnakan takaran dengan adil saat menakar untuk orang lain maupun untuk diri sendiri. Dan janganlah melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri akibat merugikan orang lain. Merugikan manusia pada barang-barangnya dan hak-haknya dengan mengurangi kadar atau nilainya merupakan perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam. Dan janganlah melakukan kejahatan di bumi dengan menjadi perusak dalam bentuk apapun.⁴⁷

Indikator keuangan menekankan pada *input* dan *output* yang berkaitan dengan anggaran dan realisasinya, sedangkan indikator non keuangan menekankan pada *outcome*, yaitu kualitas dan kepuasan pelayanan. Maka pengukuran dengan konsep *value for money* menekankan keseimbangan antara kinerja keuangan dan kinerja non keuangan.⁴⁸ Pengukuran menggunakan konsep *value for money* dilakukan terhadap kinerja keuangan untuk mengetahui perkembangan kinerja sektor publik dalam menjalankan kegiatannya. Kinerja yang ideal harus berjalan secara ekonomis dalam pengelolaan biaya dan

⁴⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf An-Nur Al-Qur'anul Karim*, hlm. 374.

⁴⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 330-332.

⁴⁸Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, *Teori Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik dari Anggaran hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah hingga Tempat Ibadah*, hlm. 132.

memiliki kualitas pelayanan yang baik, sehingga dapat dikaitkan dengan rendahnya komentar dari masyarakat.⁴⁹

b. Manfaat *Value For Money*

Kejujuran dan transparansi dalam mengelola keuangan daerah merupakan tanggung jawab yang harus diemban oleh setiap sektor publik. Maka dibutuhkan *value for money* dalam mengatur dan mengukur keuangan daerah.⁵⁰ Konsep *value for money* dijadikan sebagai teknik pengukuran kinerja keuangan sektor publik yang sesuai dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).⁵¹ Penerapan konsep *value for money* akan memberikan beberapa manfaat, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas mutu pelayanan sektor publik dengan baik.
- 2) Penyaluran dana lebih terarah, yaitu untuk kepentingan publik.
- 3) Terhindar dari pemborosan, karena dalam pemakaian *input* hanya digunakan sesuai kebutuhan saja.
- 4) Semakin meningkat kesadaran mengenai dana publik merupakan hal utama dalam penerapan kegiatan akuntabilitas publik.

⁴⁹Anik Yuesti, dkk, *Akuntansi Sektor Publik* (Bali: CV. Noah Aletheia, 2020), hlm. 68.

⁵⁰Erasma Fitilai Zalog dan Progresif Buulolo, “Analisis Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan dengan Pendekatan Value For Money Periode 2018,” 19 September 2020, hlm. 580–581.

⁵¹Mohamad Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* (Tangerang: Universitas Terbuka, 2019), hlm. 3.

- 5) Pelayanan publik akan diterapkan dan disalurkan sesuai dengan sasaran yang benar, sehingga pelayanannya lebih efektivitas.⁵²

c. Indikator *Value For Money*

Indikator berperan untuk memfokuskan perhatian pada bidang yang akan dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja. Adanya indikator pada pengukuran *value for money* membantu dalam memberikan keputusan mengenai ukuran pencapaian kegiatan yang menjadi bahan evaluasi.⁵³ Indikator dalam *value for money* harus memiliki beberapa karakteristik, yaitu mudah dipahami, dapat diukur, dan fokus pada kualitas pelayanan.⁵⁴ Dalam penerapan konsep *value for money* perlu diketahui mengenai beberapa bagian, yang nantinya akan digunakan dan ditentukan dalam pengukuran, yaitu seperti:

- 1) *Input* merupakan sumber daya yang digunakan untuk menjalankan suatu kegiatan dalam menghasilkan *output*. *Input* dinyatakan dalam bentuk nilai uang. Pengukuran *input* dilakukan dengan membandingkan *input* berupa kas dan *input* yang direalisasikan.
- 2) *Output* merupakan hasil langsung dari suatu proses yang dilaksanakan menggunakan *input*. Ukuran *output* menunjukkan

⁵²Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), hlm. 5.

⁵³Gabriela Thalia wuwungan, dkk, "Penerapan Metode Value For Money Sebagai Tolak Ukur Penilaian Kinerja Keuangan pada Organisasi Sektor Publik di Dinas Kesehatan Kota Manado," hlm. 355.

⁵⁴Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, *Teori Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik dari Anggaran hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah hingga Tempat Ibadah*, hlm. 135.

hasil implementasi kegiatan yang berbentuk barang atau jasa. Pengukuran *output* harus memiliki karakter seperti tepat waktu, sesuai harapan, dan tepat sasaran.

- 3) *Outcome* merupakan dampak yang dirasakan oleh masyarakat akibat dari suatu kegiatan. Pengukuran *outcome* digunakan untuk mengukur kualitas *output* dan dampak yang dihasilkan. *Outcome* dapat diukur apabila kegiatan sudah selesai dilakukan.⁵⁵

Berikut indikator *value for money* dalam pengukuran kinerja keuangan sektor publik, yaitu sebagai berikut:

- 1) Ekonomis merupakan penggunaan *input* dengan kuantitas nilai uang yang layak. Konsep ekonomis terkait dengan penghematan anggaran dan tidak melakukan pemborosan dalam kegiatan.⁵⁶
- 2) Efisiensi merupakan pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* yang minim. Pengukuran efisiensi dilihat dari penggunaan dana dalam menghasilkan *output* yang bernilai guna.⁵⁷
- 3) Efektivitas merupakan perbandingan antara hasil kegiatan yang dicapai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Kinerja suatu instansi akan dikatakan efektivitas, apabila *output* yang dihasilkan dari penggunaan *input* yang minim memberikan pengaruh

⁵⁵Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, *Teori Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik dari Anggaran hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah hingga Tempat Ibadah*, hlm. 136-137.

⁵⁶Dwi Purwiyanti, "Analisis Kinerja Berbasis Konsep Value For Money pada Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi," *E Jurnal Katalogis*, Vol. 5, No. 3, Maret 2017, hlm. 192.

⁵⁷Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*, hlm. 4.

terhadap sasaran. Semakin besar pengaruh terhadap tujuan, maka semakin efektif kinerja sektor publik.⁵⁸

d. Langkah-Langkah Pengukuran *Value For Money*

Terdapat beberapa langkah-langkah dalam melakukan pengukuran *value for money* dari segi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, antara lain sebagai berikut:

1) Pengukuran Ekonomis

Pengukuran dari segi ekonomis hanya akan mempertimbangkan *input* yang dipakai. Sumber daya yang dimiliki sektor publik dikelola dengan cermat, sehingga memiliki tingkat kualitas yang baik. Suatu kinerja akan disebut ekonomis apabila realisasi anggaran tidak melebihi anggaran yang masuk.⁵⁹ Menurut Mahmudi cara untuk mengukur kinerja keuangan dari segi ekonomis, yaitu menggunakan rumus:⁶⁰

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Input}}{\text{Input Value}} \times 100\%$$

Setelah diperoleh hasil perhitungan tersebut, kaitkan dengan kriteria ekonomis, yaitu sebagai berikut:

- a) Apabila mendapatkan persentase nilai lebih besar dari 100 akan digolongkan tidak ekonomis.
- b) Apabila mendapatkan persentase nilai sama dengan 100 akan digolongkan ekonomis berimbang.

⁵⁸Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, hlm. 166.

⁵⁹Abdul Halim Syam Kusufi, *Teori Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik dari Anggaran hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah hingga Tempat Ibadah*, hlm. 132-133.

⁶⁰Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: UII Press, Maret 2016), hlm. 21.

- c) Apabila mendapatkan persentase nilai kurang dari 100 akan digolongkan ekonomis.⁶¹

2) Pengukuran Efisiensi

Pengukuran efisiensi merupakan pengukuran yang menggunakan hubungan antara *output* yang dihasilkan dengan *input* yang digunakan. Semakin besar *output* yang dicapai jika dibandingkan dengan *input*, maka kinerja sektor publik akan dikatakan efisiensi.⁶² Menurut Mahmudi cara untuk mengukur kinerja keuangan dari segi efisiensi, yaitu menggunakan rumus:⁶³

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

Setelah diketahui hasil pengukuran tersebut, maka kaitkan dengan kriteria yang dimiliki oleh efisiensi, yaitu sebagai berikut:

- a) Apabila mendapatkan persentase nilai lebih dari 100 akan digolongkan efisiensi.
- b) Apabila mendapatkan persentase nilai sama dengan 100 akan digolongkan efisiensi berimbang.
- c) Apabila mendapatkan persentase nilai kurang dari 100 akan digolongkan tidak efisiensi.⁶⁴

3) Pengukuran Efektivitas

Efektivitas merupakan ukuran untuk mengetahui tingkat pencapaian sasaran dan tujuan sektor publik. Secara sederhana

⁶¹ Mohamad Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, hlm. 19.

⁶² Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, hlm. 165.

⁶³ Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik*, hlm. 21.

⁶⁴ Mohamad Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, hlm. 19.

efektivitas disebut hubungan antara *outcome* dan *output*. Apabila suatu organisasi mampu mencapai sasaran dan tujuan, maka dapat dikatakan bahwa kinerja organisasi tersebut sudah efektif. Suatu kegiatan mungkin dilakukan secara efisien, namun belum tentu efektif jika kegiatan tidak menambah nilai bagi publik.⁶⁵ Menurut Mahmudi cara untuk mengukur kinerja keuangan dari segi efektivitas, yaitu menggunakan rumus:⁶⁶

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Setelah diperoleh hasil perhitungan tersebut, kemudian kaitkan hasilnya dengan kriteria yang dimiliki efektivitas yaitu:

- a) Apabila mendapatkan persentase nilai lebih dari 100 akan digolongkan efektif.
- b) Apabila mendapatkan persentase nilai sama dengan 100 akan digolongkan efektif berimbang.
- c) Apabila mendapatkan persentase nilai kurang dari 100 akan digolongkan tidak efektif.⁶⁷

3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

- a. Pengertian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah laporan yang berisi penerapan akuntabilitas dan kinerja instansi

⁶⁵Abdul Halim Syam Kusufi, *Teori Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik dari Anggaran hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah hingga Tempat Ibadah*, hlm. 134.

⁶⁶Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik*, hlm. 22.

⁶⁷Mohamad Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, hlm. 20.

pemerintah dalam merealisasikan anggaran dan kegiatan yang disampaikan secara sistematis.⁶⁸ LAKIP dapat dikategorikan sebagai laporan rutin, karena disusun setahun sekali sesuai siklus anggaran yang berjalan dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.⁶⁹ Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dijelaskan bahwa pemerintah daerah maupun satuan kerja perangkat daerah wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah agar mampu mempertanggungjawabkan kegiatan yang diselenggarakan setiap tahun.⁷⁰

LAKIP merupakan suatu laporan yang bersifat vertikal, yaitu laporan yang disediakan untuk atasannya, seperti kepala administrasi negara dan BPKP yang berkaitan dengan catatan atas laporan kinerja keuangan.⁷¹ Laporan harus disusun secara jujur, objektif, akurat, dan transparan agar kualitas laporan menjadi lebih baik. Penyusunan

⁶⁸Zaenal Mukarom dan Muhibudin Wijaya Laksana, *Membangun Kinerja Pelayanan Publik Menuju Clean Government and Good Governance*, hlm. 214.

⁶⁹Teresia Atikapuspa Wardhani, “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pendekatan Value For Money”, hlm. 22.

⁷⁰Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Analisis atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, “<https://peraturanpedia.id/permenpan-rb-nomor-53-tahun-2014/>,” diakses 8 Maret 2022, pukul 08.00 WIB.

⁷¹Jamaluddin Majid, *Akuntansi Sektor Publik* (Gowa: Pusaka Almailda, November 2019), hlm. 128.

LAKIP diharapkan agar setiap instansi mampu dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.⁷²

Keberadaan LAKIP dijadikan sebagai sarana dalam mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah yang dikaitkan dengan anggaran dan proses pencapaian tujuan instansi pemerintah. Selain itu, LAKIP juga harus menyajikan data dan informasi relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara mendalam. Oleh karena itu perlu dibuat suatu analisis pencapaian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan dalam perbaikan kinerja yang berkesinambungan.⁷³

b. Manfaat Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Setiap daerah mengharapkan agar layanan yang disediakan untuk masyarakat dapat disalurkan dengan baik dan sesuai peraturan yang telah ditetapkan, sehingga tercipta tata kelola sesuai harapan (*good governance*). Tata kelola yang sesuai dengan *good governance* merupakan tata kelola pemerintah yang bertanggung jawab dalam menjalankan pemerintah secara efektif dan efisien, sehingga membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bukti

⁷²Jenefer Hermina Worotikan, dkk, "Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa," *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol. 13, No. 4, 2018, hlm. 547–548.

⁷³Beby Nurtesha Putri, "Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kubu Raya," *Jurnal Akuntansi Maranatha*, Vol. 11, No. 2, November 2019, hlm. 277.

pertanggungjawaban atas pelaporan kegiatan disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, atau yang biasa disebut dengan LAKIP.⁷⁴ Pentingnya menyusun LAKIP akan memberikan beberapa manfaat, yaitu:

- 1) Meningkatkan akuntabilitas instansi yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap satuan kerja perangkat daerah.
- 2) Mengetahui penilaian terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- 3) Menjadi satuan kerja perangkat daerah yang akuntabel, sehingga beroperasi secara ekonomis, efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
- 4) Mendorong satuan kerja perangkat daerah untuk melaksanakan tugas secara transparan dan bisa mempertanggungjawabkan kegiatan sesuai aturan.
- 5) Menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja satuan kerja perangkat daerah.⁷⁵

c. Format Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Format LAKIP disusun untuk memudahkan dalam membandingkan dan mengevaluasi akuntabilitas yang harus

⁷⁴Jenefer Hermina Worotikan, dkk, "Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa," hlm. 546.

⁷⁵Beby Nurtesha Putri, "Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kubu Raya," hlm. 281.

dilakukan. Disamping itu, LAKIP juga menyajikan aspek keuangan yang mengaitkan hubungan antara anggaran yang dibelanjakan dengan hasil dan manfaat yang didapatkan. Berikut format dari penyusunan LAKIP, yaitu:

1) Ikhtisar Eksekutif

Pada bagian ini disajikan ringkasan mengenai tujuan dan sasaran serta capaian kinerja sektor publik tersebut. Ikhtisar eksekutif juga menyajikan ringkasan mengenai kendala-kendala yang dihadapi dan cara untuk mengatasi kendala tersebut, serta langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

2) Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini menyajikan gambaran umum organisasi dan permasalahan yang dihadapi organisasi.

3) Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Dalam bab ini diuraikan mengenai beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja, yaitu:

- a) Rencana strategis yang berisi uraian singkat mulai dari visi, misi, tujuan, dan sasaran.
- b) Formulir Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berisi sasaran strategis dan indikatornya disertai dengan cara perhitungan untuk mengukur capaian indikator sasaran.

c) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang berisi sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, dan akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan.

4) Bab III Akuntabilitas Kinerja

a) Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan sasaran kinerja organisasi berdasarkan hasil pengukuran. Setiap capaian kinerja akan menyajikan beberapa analisis, yaitu diantaranya mengenai hasil pengukuran kinerja, perbandingan antara realisasi kinerja dan target kinerja, evaluasi, penggunaan sumber daya, keberhasilan dan kegagalan kinerja, serta solusi yang akan dilakukan.⁷⁶

b) Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini menyajikan realisasi anggaran yang sudah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi berdasarkan dokumen perjanjian kinerja. Laporan realisasi anggaran adalah laporan keuangan yang menjelaskan anggaran masuk dan pengalokasian anggaran yang dikelola dalam satu periode pelaporan.⁷⁷

⁷⁶Rusdiani dan Nasihudin, *Akuntabilitas Kinerja Penelitian* (Bandung: Pusat Penelitian dan UIN SGD Bandung, Agustus 2018), hlm. 51.

⁷⁷Halkadri Fitra, *Analisis Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah* (Purwokerto: CV. IRDH, 2019), hlm. 36.

5) Bab IV. Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah yang akan diterapkan dalam meningkatkan kinerja di masa mendatang.

6) Lampiran

Setiap bentuk penjelasan lebih lanjut yang akan disajikan dalam lampiran, yaitu seperti perhitungan-perhitungan, gambar, sarana prasarana, metode, penghargaan, dan aspek lain, serta data relevan yang hendaknya tidak diuraikan dalam badan teks laporan, tetapi dimuat dalam lampiran.⁷⁸

4. Standar Pelayanan Minimum

a. Pengertian Standar Pelayanan Minimal

Menurut Zaenal Mukarom standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu urusan pemerintah dalam memberikan pelayanan dasar terhadap masyarakat secara minimal.⁷⁹ Standar pelayanan minimal juga dapat diartikan sebagai istilah yang berkaitan dengan tingkatan kuantitas dan kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah terhadap masyarakat.⁸⁰ Standar pelayanan minimal dijadikan sebagai pedoman dan bukti tanggung jawab untuk menjamin mutu masyarakat dalam mendapatkan

⁷⁸Rusdiani dan Nasihudin, *Akuntabilitas Kinerja Penelitian*, hlm. 51.

⁷⁹Zaenal Mukarom dan Muhibudin Wijaya Laksana, *Membangun Kinerja Pelayanan Publik Menuju Clean Government and Good Governance*, hlm. 62.

⁸⁰Martinus Syamsudin, "Implementasi Standar Pelayanan Minimal Masyarakat Desa Ujung Kempas Kecamatan Ketungau Hulu," *Fokus*, Vol. 19, No. 1, Maret 2021, hlm. 21.

pelayanan dasar sesuai dengan ukuran-ukuran yang sudah ditetapkan.⁸¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 18 Ayat 2 Tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa pemerintah daerah perlu menetapkan peraturan pemerintah mengenai standar pelayanan minimal.⁸² Standar pelayanan minimal mencakup kewenangan wajib dalam melengkapi berbagai jenis standar kinerja yang menjadi tolak ukur dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Keberadaan standar pelayanan minimal memberikan nilai transparan dan akuntabilitas terhadap pelaksanaan pelayanan publik. Transparan yang berarti dapat diakses oleh pihak yang membutuhkan, dan akuntabilitas yang berarti dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dengan adanya standar pelayanan minimal akan membantu menghindari kesalahan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.⁸³

Penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal akan lebih mudah jika pemerintah daerah membuat indikator, target, dan capaian, sehingga dapat mempermudah proses penganggaran dan perencanaan sektor publik serta dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi. Pemerintah menjadikan standar pelayanan minimal sebagai pedoman dalam

⁸¹Habib Muhsin Syafingi, "Konstitusionalitas Standar Pelayanan Minimal," hlm. 218.

⁸²Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 18 Ayat 2 Tentang Pemerintah Daerah, "<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>," diakses 7 Maret 2022, pukul 11.00 WIB.

⁸³Ni Ketut Riani, "Strategi Peningkatan Pelayanan Publik," *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 1, No. 11, April 2021, hlm. 2448–2450.

menentukan biaya yang digunakan untuk memberikan pelayanan publik. Sedangkan bagi masyarakat berguna sebagai acuan dalam menilai pelayanan yang diberikan pemerintah. Oleh karena itu, setiap sektor publik harus memiliki standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.⁸⁴

b. Tujuan Standar Pelayanan Minimal

Standar pelayanan minimal dijadikan sebagai pedoman yang membantu pemerintah dalam menyusun perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat. Adanya standar pelayanan minimal diharapkan mampu menciptakan pelayanan publik yang merata, dan terhindar dari kesenjangan pelayanan antar daerah.⁸⁵ Berikut beberapa tujuan atas penerapan standar pelayanan minimal, yaitu:

- 1) Membantu menentukan anggaran untuk kegiatan pemerintahan.
- 2) Menciptakan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
- 3) Memberikan jaminan terhadap masyarakat atas pelayanan publik.
- 4) Menjadi pedoman dan tolak ukur dalam memberikan pelayanan .
- 5) Membantu dalam mengukur atas penilaian kinerja.⁸⁶

⁸⁴Habib Muhsin Syafingi, "Konstitusionalitas Standar Pelayanan Minimal", hlm. 217-218.

⁸⁵Rahmat Tantowi, "Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sebagai Strategi dalam Meningkatkan Pelayanan Publik," *Jurnal Samudra Ekonomika*, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm. 180.

⁸⁶Ayu Septiana, Dewi Susilowati, dkk, "Standar Pelayanan Minimal," https://www.academia.edu/37796665/STANDAR_PELAYANAN_MINIMAL_SPM_STANDAR_PELAYANAN_MINIMAL_SPM, 17 Oktober 2021, pukul 10.00 WIB.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

Nomor	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Teresia Atikapuspa Wardhani, Skripsi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta (2017)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pendekatan <i>Value For Money</i> (Studi Kasus di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung)	Hasil penelitian kinerja keuangan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dalam program pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial, program pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan, tergolong ekonomis dan sangat efisiensi. Namun jika dilihat dari segi efektivitas menghasilkan penilaian yang bervariasi, yaitu masuk kategori efektif dan cukup efektif. ⁸⁷
2	Triniyati, Skripsi, Universitas Negeri Sumatera Utara Medan (2018)	Analisis Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun dengan Pendekatan <i>Value For Money</i> Periode Tahun 2015-2017	Hasil penelitian dari kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun dengan konsep <i>value for money</i> , yaitu berjalan secara ekonomis pada tahun 2015-2017. Kemudian pada tahun 2015 dan 2016 berjalan secara efisien, namun pada tahun 2017 masuk dalam kategori efisien berimbang. Sedangkan dari segi efektivitas pada tahun 2015-2017 berjalan secara efektif. ⁸⁸
3	Fitriani, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar (2017)	Analisis <i>Value For Money</i> dalam Pengukuran	Hasil penelitian dari kinerja keuangan Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba

⁸⁷Teresia Atikapuspa Wardhani, "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pendekatan *Value For Money*," hlm. 87–88.

⁸⁸Triniyati, "Analisis Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun dengan Pendekatan *Value For Money* Periode Tahun 2015-2017" (Skripsi, Universitas Negeri Sumatera Utara Medan, 2018), hlm. 83.

		Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba	ditinjau dari elemen ekonomis, efisiensi, dan efektivitas telah memenuhi syarat <i>value for money</i> , dimana setiap elemen mencapai nilai rasio maksimal yaitu di atas 100%. ⁸⁹
4	Yosie Dwinanda, Skripsi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta (2018)	Analisis <i>Value For Money</i> dalam Pengukuran Kinerja pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta	Hasil penelitian mengenai kinerja Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta pada tahun 2013-2017 yang dihitung secara keseluruhan menunjukkan kinerja yang ekonomis, cukup efisiensi, dan kurang efektif. ⁹⁰
5	Nur Zeni Amilia Putri, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (2020)	Analisis <i>Value For Money</i> pada Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Hasil penelitian dari kinerja keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016-2018, jika dihitung secara keseluruhan tergolong efisiensi, ekonomis, dan tidak efektif. ⁹¹

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, terdapat beberapa perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti, diantaranya:

1. Teresia Atikapuspa Wardhani, persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan konsep *value for money* untuk mengukur kinerja keuangan dinas sosial. Sedangkan perbedaannya adalah periode pengukuran kinerja keuangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pada tahun 2015, dan berlokasi di Kabupaten Temanggung, serta kinerja keuangan yang diukur

⁸⁹Fitriani, “Analisis Value For Money dalam Pengukuran Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba” (*Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017), hlm. 82.

⁹⁰Yosie Dwinanda, “Analisis Value For Money dalam Pengukuran Kinerja pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta” (*Skripsi*, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2018), hlm. 133–134.

⁹¹Nur Zeni Amilia Putri, “Analisis Value For Money pada Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur,” hlm. 101.

dalam penelitian ini hanya mengukur berdasarkan dua kegiatan, yaitu rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan kelompok usaha bersama.

2. Triniyati, persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan indikator *value for money* untuk mengukur kinerja keuangannya. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu dilakukan di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun, dan periode yang diukur dalam penelitian ini menggunakan tahun 2014-2018.
3. Fitriani, persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan konsep *value for money* dalam mengukur kinerja. Sedangkan perbedaannya yaitu lokasi penelitian di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba, dan periode yang diukur menggunakan tahun 2014-2016.
4. Yosie Dwinanda, persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama mengukur kinerja keuangan menggunakan konsep *value for money*. Sedangkan perbedaan penelitian ini, yaitu dilakukan untuk mengukur kinerja keuangan dalam memberikan kualitas pendidikan yang baik dan berlokasi di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, serta periode yang diukur dalam penelitian ini menggunakan tahun 2013-2017.
5. Nur Zeni Amilia Putri, persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama mengukur kinerja keuangan menggunakan konsep *value for money*. Sedangkan perbedaan penelitian ini ada pada jenis kantor dan lokasinya, yaitu di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, serta tahun yang diukur dalam penelitian ini menggunakan tahun 2016-2018.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu Jalan Kota Pinang–Gunung Tua, Nomor 78, Simbolon, Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, 22753. Adapun waktu penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pada bulan Desember 2021 sampai dengan Juni 2022.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang menemukan pengetahuan menggunakan data yang dapat dihitung atau diukur dan dinyatakan dalam bentuk angka sebagai alat untuk menganalisis hasil temuan. Penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan sesuatu berdasarkan fakta yang diperoleh, dilihat, dan yang dirasakan.⁹² Penelitian kuantitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang mendeskripsikan sesuatu sesuai fakta yang akurat dengan menggambarkan keadaan secara detail.⁹³ Tujuan dilakukannya penelitian melalui pendekatan ini, yaitu untuk mendapatkan informasi dan menjelaskan tentang analisis kinerja keuangan menggunakan konsep *value for money* pada kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara.

⁹²Elidawaty Purba, dkk, *Metode Penelitian Ekonomi* (Pematangsiantar: Yayasan Kita Menulis, Juni 2021), hlm. 13-19.

⁹³Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 62.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh bagian yang termasuk sumber dalam memperoleh data untuk bisa dijadikan sebagai sampel, dan sudah ditentukan oleh peneliti untuk bisa menarik kesimpulan.⁹⁴ Jadi dalam penelitian ini yang menjadi populasi yaitu realisasi masyarakat penerima bantuan program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, program perlindungan dan jaminan sosial, serta program rehabilitasi sosial.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari anggota populasi yang diperoleh sesuai prosedur tertentu.⁹⁵ Penelitian ini mengambil sampel menggunakan teknik *sampling incidental*, yang merupakan teknik penentuan sampel dengan cara kebetulan atau tersedia di suatu tempat, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan memiliki kategori untuk bisa dijadikan sebagai sampel serta pantas dijadikan sebagai sumber data.⁹⁶

Besaran atau ukuran sampel sangat tergantung dari besaran tingkat toleransi kesalahan (*error tolerance*) yang diinginkan peneliti. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin, yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

⁹⁴Elidawaty Purba, dkk, *Metode Penelitian Ekonomi*, hlm. 121.

⁹⁵Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, hlm. 144.

⁹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: CV. Alfabeta, Maret 2012), hlm. 122.

Keterangan:

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = *Error Tolerance*⁹⁷

Berdasarkan rumus di atas, maka dapat ditentukan jumlah sampel untuk setiap program yang ada dalam penelitian ini. Sehingga perhitungan rumus slovin untuk program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, yaitu:

$$n = \frac{5.522}{1 + 5.522 (0,15)^2}$$

$$n = \frac{5.522}{125,245}$$

$$n = 44,08 \text{ dibulatkan menjadi } 44$$

Maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 44 responden. Sampel yang diambil oleh peneliti terdiri dari masyarakat penerima bantuan dari program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin. Sedangkan perhitungan rumus slovin untuk program perlindungan dan jaminan sosial, yaitu:

$$n = \frac{10.437}{1 + 10.437 (0,15)^2}$$

$$n = \frac{10.437}{235,8325}$$

$$n = 44,25 \text{ dibulatkan menjadi } 44$$

⁹⁷Elidawaty Purba, dkk, *Metode Penelitian Ekonomi*, hlm. 126.

Maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 44 responden. Sampel yang diambil oleh peneliti terdiri dari masyarakat penerima bantuan dari program perlindungan dan jaminan sosial. Sedangkan perhitungan rumus slovin untuk program rehabilitasi sosial, yaitu:

$$n = \frac{167}{1 + 167 (0,15)^2}$$

$$n = \frac{167}{4,7575}$$

$$n = 35,10 \text{ dibulatkan menjadi } 35$$

Maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 35 responden. Sampel yang diambil oleh peneliti terdiri dari masyarakat penerima bantuan dari program rehabilitasi sosial.

D. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung, yaitu dibuat oleh pihak lain melalui sumber yang sudah ada. Dalam penelitian ini yang berasal dari data sekunder yaitu laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara.

Sedangkan data primer yaitu data yang didapatkan dari sumber data langsung, yaitu para pelaku yang terlibat langsung dengan peristiwa dan menjadi saksi mata dalam mengetahui peristiwa tersebut.⁹⁸ Jadi yang

⁹⁸Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Kediri: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 67-68.

termasuk data primer dalam penelitian ini yaitu kuesioner yang diberikan kepada penerima bantuan dinas sosial mengenai bantuan yang diterima.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang dapat diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan komunikasi antara dua orang atau lebih yaitu pewawancara dan orang yang diwawancarai, dan di dalamnya terdapat kegiatan tanya-jawab. Kemudian hasil dari jawaban tersebut bisa dijadikan sumber data dan informasi sehingga membantu peneliti dalam melakukan penelitian.⁹⁹ Dalam penelitian ini, wawancara yang dilakukan peneliti dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara, yaitu sekretaris dan masyarakat penerima bantuan guna mengetahui gambaran umum dan pelaksanaan program dinas sosial.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data yang diperoleh melalui catatan, buku, data, surat kabar, dan agenda lainnya yang berisi catatan peristiwa penting.¹⁰⁰ Jadi dalam penelitian ini akan dihimpun data-data secara tidak langsung yang ada di dinas sosial seperti visi misi organisasi, struktur organisasi, dan LAKIP Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara.

⁹⁹Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, hlm. 372.

¹⁰⁰Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, hlm. 77–78.

3. Angket

Data yang diperoleh dari kuesioner merupakan alat ukur dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti untuk dijawab oleh responden secara tertulis pada lembaran kertas yang sudah disediakan.¹⁰¹ Kuesioner dalam penelitian ini diambil dari kuesioner penelitian sebelumnya dan disesuaikan dengan tempat penelitian yang sedang diteliti. Tujuan dibuatnya kuesioner adalah untuk mengetahui *outcome* dan respon masyarakat terhadap program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu pada program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, program perlindungan dan jaminan sosial, dan program rehabilitasi sosial.

Tabel III.1
Kisi-Kisi Angket Kinerja Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Nomor	Indikator Penelitian	Item Soal
1	Pemberian bantuan bagi penyandang masalah sosial sesuai dengan masalah kesejahteraan sosial	1
2	Pelayanan yang diberikan oleh dinas sosial terhadap masyarakat	2, 3, 4
3	Program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin bisa dirasakan langsung oleh masyarakat	5, 6
4	Dinas sosial memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam beraktivitas	7, 8, 9, 10

¹⁰¹Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, hlm. 199.

Tabel III.2
Kisi-Kisi Angket Kinerja Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Nomor	Indikator Penelitian	Item Soal
1	Pemberian bantuan bagi penyandang masalah sosial sesuai dengan masalah kesejahteraan sosial	1
2	Pelayanan yang diberikan oleh dinas sosial terhadap masyarakat	2, 3, 4
3	Program perlindungan dan jaminan sosial bisa dirasakan langsung oleh masyarakat	5, 6
4	Dinas sosial memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam beraktivitas	7, 8, 9, 10

Tabel III.3
Kisi-Kisi Angket Kinerja Program Rehabilitasi Sosial

Nomor	Indikator Penelitian	Item Soal
1	Pemberian bantuan bagi penyandang masalah sosial sesuai dengan masalah kesejahteraan sosial	1
2	Pelayanan yang diberikan oleh dinas sosial terhadap masyarakat	2, 3, 4
3	Program rehabilitasi sosial bisa dirasakan langsung oleh masyarakat	5, 6
4	Dinas sosial memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam beraktivitas	7, 8, 9, 10

Peneliti menggunakan angket agar masyarakat bisa memberikan skor atau penilaian dari setiap pernyataan dalam angket. Pemberian skor akan menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang dijadikan sampel dalam

penelitian. Adapun kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala *likert* dengan ketentuan skor sebagai berikut:

Tabel III.4
Penetapan Skor Atas Jawaban Kuesioner

Indikator	Keterangan	Skor
SP	Sangat Puas	5
P	Puas	4
KP	Kurang Puas	3
TP	Tidak Puas	2
STP	Sangat Tidak Puas	1

F. Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner yang dikatakan valid jika pernyataan tersebut mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dilakukan dengan teknik melalui perbandingan r_{hitung} terhadap r_{tabel} . Nilai r_{hitung} dapat dilihat pada kolom *pearson correlation*, sedangkan nilai r_{tabel} diperoleh melalui df (*degree of freedom*) = $n-2$, n adalah jumlah sampel dan menggunakan taraf signifikan 5%. Apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengukur apakah pernyataan- pernyataan yang terdapat pada kuesioner sudah mengukur apa yang ingin diungkap.¹⁰²

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana suatu ukur dapat dipercaya dan diandalkan. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika

¹⁰²Rochmat Aldy Purnomo, *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan SPSS* (Ponorogo: CV. Wade Group, 2016), hlm. 65–69.

jawaban seseorang terhadap pernyataan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas merupakan kelanjutan dari pernyataan yang dinyatakan valid. Dalam SPSS ada fasilitas yang dapat digunakan untuk mengukur reliabilitas yaitu melalui uji statistik *cronbach's alpha*, dan akan dikatakan reliabel jika nilai *cronbach's alpha* $> 0,60$. Semakin tinggi nilai *cronbach's alpha* seperti mendekati angka 1, maka menunjukkan semakin tinggi konsistensi internal reliabilitasnya.¹⁰³

G. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka data yang bersifat kuantitatif, yaitu berwujud angka yang dapat diukur dan dihitung dengan cara dianalisis guna memberikan gambaran yang jelas dan bisa menarik kesimpulan. Dalam hal ini, analisis yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara menggunakan konsep *value for money* yang terdiri dari tiga elemen penting yaitu:

1. Ekonomis

Pengukuran ekonomis akan mempertimbangkan masukan dengan kualitas tertentu yang dikelola dengan hati-hati, hemat, dan tidak boros. Dalam melakukan pengukuran ekonomis memerlukan perbandingan antara anggaran dan realisasinya. Suatu organisasi dikatakan ekonomis ketika organisasi tersebut mampu meminimalisir anggaran dengan baik.¹⁰⁴ Menurut Mahmudi berikut cara untuk mengukur tingkat ekonomis:¹⁰⁵

¹⁰³Budi Darma, *Statistika Penelitian Menggunakan SPSS* (Jakarta: Guepedia, Agustus 2021), hlm. 17.

¹⁰⁴Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, hlm. 5.

¹⁰⁵Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik*, hlm. 21.

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{input}}{\text{input value}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan kemudian diklasifikasikan sesuai kriteria penilaian yaitu:

- a. Jika persentase nilai lebih besar dari 100 akan digolongkan tidak ekonomis.
- b. Jika persentase nilai sama dengan 100 akan digolongkan ekonomis berimbang.
- c. Jika persentase nilai kurang dari 100 akan digolongkan ekonomis.¹⁰⁶

2. Efisiensi

Efisiensi merupakan kaitan antara *input* yang dimiliki organisasi yang digunakan untuk mencapai *output* sesuai standar kinerja. Suatu organisasi dikatakan efisiensi apabila organisasi tersebut mencapai *output* yang maksimal. Maka apabila *output* atau nilai guna memiliki nilai yang tinggi dalam pemakaian *input* yang minim, maka akan meningkat juga tingkat efisiensinya.¹⁰⁷ Menurut Mahmudi berikut cara untuk mengukur tingkat efisiensi:¹⁰⁸

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{output}}{\text{input}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan kemudian diklasifikasikan sesuai kriteria penilaian yaitu:

- a. Jika persentase nilai lebih besar dari 100 maka akan digolongkan efisiensi.

¹⁰⁶ Mohamad Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, hlm. 19.

¹⁰⁷ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, hlm. 5.

¹⁰⁸ Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik*, hlm. 21.

- b. Jika persentase nilai sama dengan 100 akan digolongkan efisiensi berimbang.
- c. Jika persentase nilai kurang dari 100 maka akan digolongkan tidak efisiensi.¹⁰⁹

3. Efektivitas

Efektivitas merupakan ukuran untuk mengetahui sudah sejauh mana keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan. Secara singkat efektivitas disebut perbandingan dari *outcome* dan *output*. Apabila organisasi mampu mencapai tujuan, maka organisasi tersebut sudah efektif.¹¹⁰ Tingkat pencapaian tujuan dapat diukur melalui pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan dinas sosial, yaitu melalui kuesioner yang pernyataannya di uji menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Kepuasan masyarakat bisa dilihat dengan memberikan skor pada jawaban kuesioner sesuai tingkat kepuasan yang dirasakan. Maka dibutuhkan perhitungan interval kepuasan, yaitu dengan cara:

$$IK \text{ maks} = R \times PP \times EX \text{ maks}$$

$$IK \text{ min} = R \times PP \times EX \text{ min}$$

$$\text{Interval} = (IK \text{ maks} - IK \text{ min}) : TS$$

Keterangan:

IK maks = Indeks Kepuasan Skor Maksimal

IK min = Indeks Kepuasan Skor Minimal

¹⁰⁹Mohamad Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, hlm. 19.

¹¹⁰Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, hlm. 5.

PP = Jumlah Pernyataan

R = Jumlah Responden

EX maks = Skor Maksimal

EX min = Skor Minimal

TS = Total Skor¹¹¹

Selanjutnya untuk mengetahui distribusi penilaian masyarakat terhadap dinas sosial digunakan metode klasifikasi intensitas berdasarkan distribusi. Metode distribusi adalah metode rata-rata yang mempertimbangkan distribusi data disesuaikan dengan kemencengan dan keruncingan sebaran data. Adapun rumus metode distribusi, yaitu:¹¹²

Tabel III.5
Penentuan Klasifikasi Intensitas Metode B

Klasifikasi Intensitas	Interval Nilai
Sangat Puas	$I \geq X + SD$
Puas	$X + \frac{1}{2} SD \leq I < X + SD$
Kurang Puas	$X - \frac{1}{2} SD \leq I < X + \frac{1}{2} SD$
Tidak Puas	$X - \frac{1}{2} SD < I < X - SD$
Sangat Tidak Puas	$I < X - SD$

Keterangan:

I = Nilai Indikator

X = Rata-Rata

SD = Standar Deviasi

Berdasarkan tabel III.5 akan dilakukan penentuan klasifikasi intensitas dengan metode distribusi yang dihitung menggunakan *Microsoft Excel*. Kemudian dilakukan pembuatan tabel interval kepuasan, dan untuk

¹¹¹Ahmad Nizar Rangkuti, *Statistik untuk Penelitian Pendidikan* (Bandung: Citapustaka Media, 2014), hlm. 22.

¹¹²Tim KPPOD, *Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia*, 2002, hlm. 112.

mengetahui *outcome* dilakukan perhitungan terhadap indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh melalui penjumlahan seluruh skor kuesioner yang diberikan responden dan indeks kepuasan skor maksimal. Berikut perhitungan untuk mengetahui pencapaian *outcome*, yaitu dengan rumus:¹¹³

$$Outcome = \frac{IKM}{IK \text{ maks}} \times 100\%$$

Kemudian hasil perhitungan tersebut digunakan dalam perhitungan efektivitas. Menurut Mahmudi rumus mengukur tingkat efektivitas, yaitu:¹¹⁴

$$Efektivitas = \frac{outcome}{output} \times 100\%$$

Hasil perhitungan kemudian diklasifikasikan sesuai kriteria penilaian yaitu:

- a. Jika persentase nilai lebih besar dari 100 maka akan digolongkan efektif.
- b. Jika persentase nilai sama dengan 100 maka akan digolongkan efektif berimbang.
- c. Jika persentase nilai kurang dari 100 maka akan digolongkan tidak efektif.¹¹⁵

¹¹³Wiryawan Wira, "Analisis Kinerja Keuangan pada Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bintang dengan Menggunakan Konsep Value For Money," hlm. 21.

¹¹⁴Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik*, hlm. 22.

¹¹⁵Mohamad Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, hlm. 20.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara

Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2007 yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Dasar hukum pendirian Kabupaten Padang Lawas Utara adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 yang disahkan pada tanggal 14 Agustus 2007. Ibu kota Kabupaten Padang Lawas Utara adalah Gunung Tua, dengan jumlah penduduk sebanyak 269.845 jiwa. Kabupaten Padang Lawas Utara menempati area seluas 3.918,05 km² atau 391.800 ha, yang terdiri dari 12 kecamatan, 386 desa, dan 2 kelurahan.¹¹⁶

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan perintah untuk membentuk dan menyusun perangkat daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah. Perangkat daerah merupakan lembaga yang membantu urusan bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Sedangkan pada Pasal 3 Ayat 4 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 08 Tahun 2016 merupakan dasar hukum

¹¹⁶<https://padanglawasutarakab.go.id/read/9/sejarah-padang-lawas-utara>, diakses 20 Mei 2022, pukul 09.00 WIB.

pembentukan perangkat daerah seperti dinas sosial yang membantu pemerintah di bidang sosial.

Dinas sosial merupakan pelaksana pemerintah yang dipimpin oleh kepala dinas yang bertanggung jawab dan berkedudukan di bawah bupati. Pemberian pelayanan yang berbentuk sosial kepada masyarakat merupakan tugas yang diberi pemerintah oleh pihak dinas sosial dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertanggungjawaban satuan kerja instansi pemerintah merupakan kewajiban untuk menjelaskan pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan dan pencapaian sasaran kepada pihak yang berkepentingan, kemudian dituangkan dalam penyusunan laporan akuntabilitas instansi pemerintah.¹¹⁷

2. Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara

Adapun visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sebagai berikut:

a. Visi

Terwujudnya masyarakat yang sejahtera, religius, dan mandiri.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- 2) Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok.

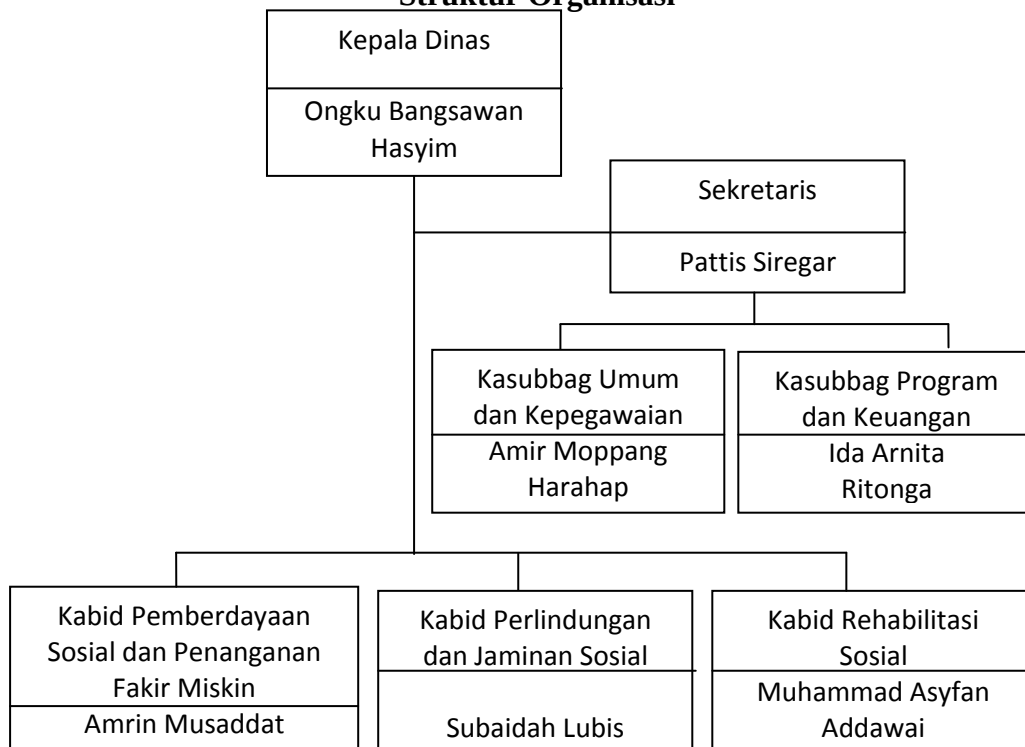
¹¹⁷<http://setdakab.padanglawaskab.go.id/wp-content/uploads/2016/11/perda-baru-pp-18>, diakses 20 Mei 2022, pukul 09.30 WIB.

- 3) Meningkatkan sumber daya manusia sebagai penerima manfaat pembangunan kesejahteraan sosial.
- 4) Meningkatkan sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk menunjang kinerja anggota dinas sosial yang profesional.
- 5) Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha yang menanamkan nilai kesetiakawanan sosial.

3. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara

Struktur organisasi adalah sistem yang digunakan untuk mendefinisikan suatu tingkatan dan hubungan antar individu dalam sebuah organisasi, dengan tujuan menetapkan cara organisasi dapat beroperasi melalui pembagian tugas berdasarkan jabatan, sehingga membantu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Gambar IV.1
Struktur Organisasi



Adapun jabatan dalam organisasi Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara, antara lain:

a. Kepala Dinas

Kepala dinas merupakan jabatan yang memiliki tugas pokok memimpin dan membantu bupati melaksanakan fungsi dalam merumuskan, melaksanakan kebijakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu Ongku Bangsawan Hasyim.

b. Sekretaris

Tugas pokok sekretaris yaitu membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan laporan keuangan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, mengelola pengadaan barang dan surat menyurat, serta pelaporan. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu Pattis Siregar.

c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala sub bagian umum dan kepegawaian membantu sebagian tugas sekretaris dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengawasan, kearsipan, dan pengelolaan fasilitas kegiatan di bidang administrasi umum. Kepala Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu Amir Moppang Harahap.

d. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Tugas kepala sub bagian program dan keuangan yaitu melaksanakan urusan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, dan pertanggungjawaban atas laporan keuangan. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu Ida Arnita Ritonga.

e. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Tugas kepala bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin yaitu membantu kepala dinas dalam penyusunan perencanaan kegiatan sesuai bidangnya, membina, mengawasi, dan melaporkan hasil kegiatan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, serta pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidangnya. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu Amrin Musaddat.

f. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kepala bidang perlindungan dan jaminan sosial mempunyai tugas merencanakan penyusunan program sesuai bidangnya, melaksanakan verifikasi dan validasi data penerima bantuan, membina, mengawasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan perlindungan dan jaminan sosial, serta pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan

oleh pimpinan sesuai dengan bidangnya. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial yaitu Subaidah Lubis.

g. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

Tugas pokok kepala bidang rehabilitasi sosial yaitu membantu kepala dinas dalam melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial, yang meliputi penyusunan perumusan rencana kegiatan sesuai bidangnya, membina, mengawasi, dan melaporkan hasil kegiatan di bidang rehabilitasi sosial, serta pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidangnya. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial yaitu Muhammad Asyfan Addawai.

4. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara

a. Tugas

Tugas Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial, yaitu:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial.
- 2) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial.
- 3) Pelaksanaan pengembangan pembangunan di bidang sosial.
- 4) Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang sosial.
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai fungsinya.

b. Fungsi

Dinas sosial dalam menyelenggarakan tugasnya memiliki beberapa fungsi, diantaranya:

- 1) Pelaksanaan dan penyusunan rencana program dan anggaran.
- 2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan pemerintah daerah di bidang sosial.
- 3) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam pelaksanaan pemerintah di bidang sosial.
- 4) Penyediaan data dan informasi urusan pemerintah daerah di bidang sosial.
- 5) Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pemerintah daerah di bidang sosial.
- 6) Pelaksanaan urusan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerjasama, organisasi, masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi.

B. Hasil Analisis

1. Uji Validitas dan Reliabilitas

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Pengujian validitas dilakukan pada 123 responden dengan 10 pernyataan untuk program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial, serta rehabilitasi sosial. Syarat agar butir soal dikatakan valid yaitu apabila nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$.

Nilai r_{tabel} dapat diperoleh melalui df (*degree of freedom*) = $n-2$ (signifikan 5%, n = jumlah sampel). Sedangkan r_{hitung} dapat dilihat pada kolom *pearson correlation*. Adapun hasil uji validitas adalah sebagai berikut:

Tabel IV.1
Hasil Uji Validitas Program Pemberdayaan Sosial
dan Penanganan Fakir Miskin

No.	Item Pernyataan	R_{hitung}	R_{tabel}	Keterangan
1	Soal 1	0,680	0,2973	Valid
2	Soal 2	0,874	0,2973	Valid
3	Soal 3	0,384	0,2973	Valid
4	Soal 4	0,407	0,2973	Valid
5	Soal 5	0,699	0,2973	Valid
6	Soal 6	0,779	0,2973	Valid
7	Soal 7	0,821	0,2973	Valid
8	Soal 8	0,586	0,2973	Valid
9	Soal 9	0,816	0,2973	Valid
10	Soal 10	0,812	0,2973	Valid

Berdasarkan tabel IV.1, dapat disimpulkan bahwa item pernyataan untuk program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin dinyatakan valid. Adapun $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$, dimana nilai r_{tabel} adalah $df = n-2 = 44-2 = 42$ pada taraf signifikan 5%, sehingga diperoleh r_{tabel} yaitu 0,2973. Sedangkan r_{hitung} dapat dilihat pada hasil *pearson correlation*.

Tabel IV.2
Hasil Uji Validitas Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

No.	Item Pernyataan	R_{hitung}	R_{tabel}	Keterangan
1	Soal 1	0,684	0,2973	Valid
2	Soal 2	0,834	0,2973	Valid
3	Soal 3	0,701	0,2973	Valid
4	Soal 4	0,532	0,2973	Valid
5	Soal 5	0,748	0,2973	Valid

6	Soal 6	0,842	0,2973	Valid
7	Soal 7	0,876	0,2973	Valid
8	Soal 8	0,537	0,2973	Valid
9	Soal 9	0,873	0,2973	Valid
10	Soal 10	0,897	0,2973	Valid

Berdasarkan tabel IV.2, dapat disimpulkan bahwa item pernyataan 1-10 untuk program perlindungan dan jaminan sosial dinyatakan valid. Adapun $r_{hitung} > r_{tabel}$, dimana nilai r_{tabel} adalah $df = 44-2 = 42$ pada taraf signifikan 5%, sehingga diperoleh r_{tabel} yaitu 0,2973. Sedangkan r_{hitung} dapat dilihat pada hasil *pearson correlation*. Maka jika *pearson correlation* lebih besar dari 0,2973 pernyataan dikatakan valid.

Tabel IV.3
Hasil Uji Validitas Program Rehabilitasi Sosial

No.	Item Pernyataan	R_{hitung}	R_{tabel}	Keterangan
1	Soal 1	0,786	0,3338	Valid
2	Soal 2	0,850	0,3338	Valid
3	Soal 3	0,561	0,3338	Valid
4	Soal 4	0,352	0,3338	Valid
5	Soal 5	0,906	0,3338	Valid
6	Soal 6	0,889	0,3338	Valid
7	Soal 7	0,909	0,3338	Valid
8	Soal 8	0,398	0,3338	Valid
9	Soal 9	0,886	0,3338	Valid
10	Soal 10	0,845	0,3338	Valid

Berdasarkan tabel IV.3 dapat disimpulkan bahwa item pernyataan untuk program rehabilitasi sosial dinyatakan valid. Apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka dinyatakan valid. Adapun nilai r_{tabel} diperoleh dari $df = 35-2 = 33$ pada taraf signifikan 5%, sehingga diperoleh r_{tabel} yaitu 0,3338 dan nilai r_{hitung} dilihat pada hasil *pearson correlation*. Maka

nilai *pearson correlation* lebih besar dari 0,3338, sehingga pernyataan dikatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas didasarkan pada nilai *cronbach's alpha* yang menunjukkan bahwa semua variabel memenuhi unsur reliabilitas, yaitu apabila nilai *cronbach's alpha* $> 0,60$ maka pernyataan tersebut dinyatakan reliabel. Hasil uji reliabilitas yang telah diolah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.4
Hasil Uji Reliabilitas untuk Setiap Program Dinas Sosial
Kabupaten Padang Lawas Utara

No.	Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items	Keterangan
1	Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	0,880	10	Reliabel
2	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	0.916	10	Reliabel
3	Program Rehabilitasi Sosial	0,917	10	Reliabel

Berdasarkan tabel IV.4 menunjukkan bahwa *cronbach's alpha* untuk program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin adalah $0,880 > 0,60$. Nilai *cronbach's alpha* untuk program perlindungan dan jaminan sosial adalah $0,916 > 0,60$. Kemudian untuk nilai *cronbach's alpha* untuk program rehabilitasi sosial adalah $0,917 > 0,60$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing pernyataan untuk setiap program Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara dikatakan reliabel.

2. *Value For Money*

Analisis kinerja keuangan menggunakan konsep *value for money* dilakukan untuk mengukur kegiatan program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial, serta rehabilitasi sosial yang berdasarkan pada rencana kerja tahunan, yaitu pada tahun 2020 dan 2021. Dalam penyusunan rencana kerja telah ditetapkan sasaran dan strategi dalam pelaksanaan program kegiatan. Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara melakukan penyusunan perencanaan pelaksanaan program beserta penyusunan anggaran yang telah diberikan dalam rangka membantu tugas pemerintah daerah di bidang sosial.

Rancangan kegiatan dan anggaran kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah serta DPRD untuk dibahas dan disahkan, sehingga anggaran dapat dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan. Hasil dari pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan harus disajikan dalam dokumen pelaksanaan anggaran, yaitu laporan realisasi anggaran yang dimuat dalam LAKIP. Sehingga hasil dari kegiatan dan anggaran yang telah dilakukan harus diukur dari segi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, yaitu menggunakan konsep *value for money*. Dalam pengukuran ini, perlu diketahui beberapa komponen yaitu:

- a. *Input* merupakan realisasi anggaran.
- b. *Input value* merupakan anggaran yang masuk.
- c. *Output* yang merupakan persentase realisasi kegiatan.
- d. *Outcome* yaitu penilaian dari penerima bantuan sosial.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pengukuran menggunakan konsep *value for money* berdasarkan kegiatan, yaitu:

a. Program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin

1. Ekonomis

Pengukuran kinerja keuangan dari segi ekonomis pada tahun 2020 dan 2021 untuk program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin dapat diukur dengan anggaran dan realisasi anggaran berikut:

Tabel IV.5
Realisasi Anggaran Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Program	2020		2021	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Rp 412.404.600	Rp 375.512.600	Rp293.297.200	Rp 275.323.200

Sumber: Diolah dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara

Berdasarkan tabel IV.5 maka dapat diketahui pengukuran kinerja keuangan dari segi ekonomis pada tahun 2020 yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Ekonomis} &= \frac{\text{Input}}{\text{Input Value}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp } 375.512.600}{\text{Rp } 412.404.600} \times 100\% \\
 &= \text{Rp } 91\%
 \end{aligned}$$

Program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin pada tahun 2020 mencapai nilai ekonomis sebesar 91%. Adapun kategori persentase penilaian pada program pemberdayaan sosial

dan penanganan fakir miskin tergolong ekonomis, karena hasil pengukuran lebih kecil dari 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dari program ini mampu meminimalisir anggaran. Sehingga indikator rasio ekonomis sudah mencapai kinerja yang baik dan berhasil dalam mengelola anggaran.

Sedangkan pengukuran ekonomis pada program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin pada tahun 2021, yaitu:

$$\begin{aligned}\text{Ekonomis} &= \frac{\text{Input}}{\text{Input Value}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp } 275.323.200}{\text{Rp } 293.297.200} \times 100\% \\ &= \text{Rp } 94\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan ekonomis pada program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin di tahun 2021 mencapai tingkat nilai ekonomis sebesar 94%. Sehingga program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin masuk dalam kategori ekonomis, karena hasil pengukuran yang lebih kecil dari 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dari program ini mampu meminimalisir anggaran dan terhindar dari pemborosan. Sehingga indikator rasio ekonomis sudah mencapai kinerja yang baik dan berhasil dalam mengelola anggaran dengan benar.

2. Efisiensi

Pengukuran kinerja keuangan dari segi efisiensi pada tahun 2020 dan 2021 untuk program pemberdayaan sosial dan

penanganan fakir miskin dapat diukur dengan capaian kinerja berikut:

Tabel IV.6
Pencapaian Kinerja Program Pemberdayaan Sosial dan
Penanganan Fakir Miskin

Program	2020			2021		
	Target	Realisasi	Output	Target	Realisasi	Output
Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Diolah dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara

Berdasarkan tabel IV.6 maka dapat diketahui pengukuran kinerja keuangan dari segi efisiensi pada tahun 2020 yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Efisiensi} &= \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\% \\
 &= \frac{100\%}{91\%} \times 100\% \\
 &= 110\%
 \end{aligned}$$

Maka hasil perhitungan dari pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin pada tahun 2020 mencapai tingkat nilai efisiensi sebesar 110%. Adapun kategori persentase pada program tersebut tergolong efisiensi, karena hasil persentase melebihi 100%. Maka ini membuktikan bahwa pelaksanaan dari program ini mampu menghasilkan kegiatan yang sesuai dengan target dan mampu menghemat anggaran.

Sedangkan pengukuran efisiensi pada program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin pada tahun 2021 yaitu:

$$\begin{aligned}
 \text{Efisiensi} &= \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\% \\
 &= \frac{100\%}{94\%} \times 100\% \\
 &= 106\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi dari seluruh pelaksanaan kegiatan pada tahun 2021 untuk program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin mencapai tingkat nilai efisiensi sebesar 106%. Adapun kategori persentase pada program tersebut tergolong efisiensi, karena hasil persentase melebihi 100%. Maka ini membuktikan bahwa pelaksanaan dari program ini mampu menghasilkan kegiatan yang sesuai dengan target dan mampu menghemat anggaran.

3. Efektivitas

Hasil uji validitas dan reliabilitas pada program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin mendapat nilai r_{tabel} yaitu 0,2973, dan r_{hitung} dilihat dari *pearson correlation*. Sehingga hasil pengukuran uji validitas pada penelitian ini dinyatakan valid, karena $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$. Sedangkan hasil uji reliabilitas memperoleh nilai *cronbach's alpha* sebesar $0,880 > 0,60$ yang menyatakan bahwa kuesioner reliabel. Berdasarkan data tersebut dapat ditentukan tingkat kepuasan publik, yaitu dengan mencari interval terlebih dahulu menggunakan rumus:

$$\text{Interval} = (\text{IK maks} - \text{IK min}) : 5$$

$$\text{IK maks} = R \times PP \times EX \text{ maks}$$

$$= 44 \times 10 \times 5$$

$$= 2.200$$

$$IK \text{ min} = R \times PP \times EX \text{ min}$$

$$= 44 \times 10 \times 1$$

$$= 440$$

$$\text{Interval} = (2.200 - 440) : 5$$

$$= 352$$

Kemudian dilakukan pengukuran klasifikasi intensitas dengan metode distribusi yang menghasilkan bahwa 5 responden merasa sangat puas terhadap kinerja pada program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin. Selanjutnya untuk Jumlah yang merasa puas terdapat 13 responden. Kemudian untuk jumlah yang merasa kurang puas terdapat 12 responden. Dan 4 responden yang merasa tidak puas. Serta 10 responden yang merasa sangat tidak puas. Sehingga dapat diperoleh interval kepuasan masyarakat, yaitu sebagai berikut:

Tabel IV.7
Interval Kepuasan Masyarakat

Interval	Kategori
440-791	Sangat Tidak Puas
792-1.143	Tidak Puas
1.144-1.495	Kurang Puas
1.496-1.847	Puas
1.848-2.200	Sangat Puas

Indeks kepuasan masyarakat diperoleh dari penyebaran kuesioner sesuai jumlah total pernyataan yaitu senilai 1.552, yang

berarti berada pada kategori puas. Maka untuk mengetahui persentase pencapaian *outcome*, ditentukan dengan rumus:

$$\begin{aligned}\text{Nilai Outcome} &= \frac{\text{IKM}}{\text{IK MAKS}} \times 100\% \\ &= \frac{1.552}{2.200} \times 100\% \\ &= 71\%\end{aligned}$$

Setelah diketahui nilai *outcome*, maka dapat diperoleh nilai efektivitas dari program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin pada tahun 2020, yaitu:

$$\begin{aligned}\text{Efektivitas} &= \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\% \\ &= \frac{71\%}{100\%} \times 100\% \\ &= 71\%\end{aligned}$$

Sedangkan nilai efektivitas pada program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin pada tahun 2021, yaitu:

$$\begin{aligned}\text{Efektivitas} &= \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\% \\ &= \frac{71\%}{100\%} \times 100\% \\ &= 71\%\end{aligned}$$

Berdasarkan pengukuran efektivitas pada program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin tahun 2020 dan 2021 mencapai nilai efektivitas sebesar 71%. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program ini tergolong belum efektif dalam mencapai tujuan, dikarenakan nilai persentase dari rasio efektivitas kurang dari 100%.

b. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

1) Ekonomis

Pengukuran kinerja keuangan dari segi ekonomis pada tahun 2020 dan 2021 untuk program perlindungan dan jaminan sosial dapat diukur dengan anggaran dan realisasi anggaran berikut:

Tabel IV. 8
Realisasi Anggaran Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program	2020		2021	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 150.089.500	Rp 143.830.700	Rp 453.369.800	Rp 414.400.800

Sumber: Diolah dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara

Berdasarkan tabel di IV.8 maka dapat diketahui pengukuran kinerja keuangan dari segi ekonomis pada tahun 2020 yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Ekonomis} &= \frac{\text{Input}}{\text{Input Value}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp } 143.830.700}{\text{Rp } 150.089.500} \times 100\% \\
 &= 96\%
 \end{aligned}$$

Hasil perhitungan kinerja keuangan Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2020 untuk program perlindungan dan jaminan sosial menghasilkan nilai ekonomis sebesar 96%. Sehingga berdasarkan tingkat penilaian tersebut masuk dalam kategori ekonomis, karena hasil pengukuran lebih kecil dari 100%. Maka dapat dikatakan bahwa anggaran yang digunakan dalam

kegiatan program perlindungan dan jaminan sosial terhindar dari pemborosan, dikarenakan mampu dalam meminimalisir anggaran.

Sedangkan pengukuran ekonomis untuk program perlindungan dan jaminan sosial pada tahun 2021 yaitu:

$$\begin{aligned}\text{Ekonomis} &= \frac{\text{Input}}{\text{Input Value}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp } 414.400.800}{\text{Rp } 453.369.800} \times 100\% \\ &= 91\%\end{aligned}$$

Hasil pengukuran ekonomis untuk program perlindungan dan jaminan sosial pada tahun 2021 menghasilkan nilai ekonomis sebesar 91%. Sehingga masuk dalam kategori ekonomis, karena hasil pengukuran yang lebih kecil dari 100%. Maka dapat diketahui bahwa anggaran yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan pada program perlindungan dan jaminan sosial terhindar dari pemborosan, karena mampu dalam meminimalisir anggaran.

2) Efisiensi

Pengukuran kinerja keuangan dari segi efisiensi pada tahun 2020 dan 2021 untuk program perlindungan dan jaminan sosial dapat diukur dengan capaian kinerja berikut:

Tabel IV.9
Pencapaian Kinerja Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program	2020			2021		
	Target	Realisasi	Output	Target	Realisasi	Output
Perlindungan dan Janinan Sosial	100%	96%	96%	100%	94%	94%

Sumber: Diolah dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara

Berdasarkan tabel IV.9 maka dapat diketahui pengukuran efisiensi pada tahun 2020 yang dilakukan dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned}\text{Efisiensi} &= \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\% \\ &= \frac{96\%}{96\%} \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Maka dapat diketahui bahwa hasil pengukuran efisiensi untuk program perlindungan dan jaminan sosial pada tahun 2020, mencapai nilai 100%. Sehingga dapat dikategorikan bahwa pelaksanaan kegiatan ini tergolong efisiensi berimbang, karena hasil pengukuran yang sama dengan 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program berjalan sesuai target.

Sedangkan pengukuran efisiensi untuk program perlindungan dan jaminan sosial pada tahun 2021 yaitu:

$$\begin{aligned}\text{Efisiensi} &= \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\% \\ &= \frac{94\%}{91\%} \times 100\% \\ &= 103\%\end{aligned}$$

Pengukuran efisiensi untuk program perlindungan dan jaminan sosial tahun 2021 memperoleh nilai 103%. Sehingga hasil penilaian tersebut dapat dikategorikan bahwa pelaksanaan kegiatan ini tergolong efisiensi, karena hasil pengukuran yang melebihi 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pada program perlindungan dan jaminan sosial yang dihasilkan sesuai target.

3) Rasio Efektivitas

Hasil uji validitas pada program perlindungan dan jaminan sosial mendapat nilai r_{tabel} sebesar 0,2973 dan nilai r_{hitung} yang dilihat dari *pearson correlation*, sehingga nilai $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$ yang menyatakan bahwa pernyataan kuesioner penelitian ini valid. Sedangkan nilai *cronbach's alpha* sebesar 0,916, yang berarti bahwa kuesioner reliabel. Berdasarkan data tersebut dapat ditentukan tingkat kepuasan publik dengan rumus berikut:

$$\text{Interval} = (\text{IK maks} - \text{IK min}) : 5$$

$$\text{IK maks} = R \times \text{PP} \times \text{EX maks}$$

$$= 44 \times 10 \times 5$$

$$= 2.200$$

$$\text{IK min} = R \times \text{PP} \times \text{EX min}$$

$$= 44 \times 10 \times 1$$

$$= 440$$

$$\text{Interval} = (2.200 - 440) : 5$$

$$= 352$$

Kemudian dilakukan pengukuran klasifikasi intensitas dengan metode distribusi yang menghasilkan 4 responden yang merasa kinerja program perlindungan dan jaminan sosial masuk dalam kategori sangat puas, 14 responden yang merasa puas, 12 responden yang merasa kurang puas, 6 responden yang merasa

tidak puas, dan 8 responden yang merasa sangat tidak puas. Sehingga diperoleh interval kepuasan masyarakat, yaitu:

Tabel IV.10
Interval Kepuasan Masyarakat

Interval	Kategori
440-791	Sangat Tidak Puas
792-1.143	Tidak Puas
1.144-1.495	Kurang Puas
1.496-1.847	Puas
1.848-2.200	Sangat Puas

Indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh dari penyebaran kuesioner dapat diketahui dari jumlah total pernyataan, yaitu 1.494, yang berarti berada pada kategori kurang puas. Kemudian dilakukan pengukuran pencapaian *outcome* dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Outcome} &= \frac{\text{IKM}}{\text{IK MAKS}} \times 100\% \\
 &= \frac{1.494}{2.200} \times 100\% \\
 &= 68\%
 \end{aligned}$$

Setelah itu akan diperoleh nilai efektivitas dari program perlindungan dan jaminan sosial tahun 2020, yaitu:

$$\begin{aligned}
 \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\% \\
 &= \frac{68\%}{96\%} \times 100\% \\
 &= 71\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil pengukuran efektivitas pada program perlindungan dan jaminan sosial tahun 2020 memperoleh nilai sebesar 71%. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program perlindungan dan jaminan sosial tergolong belum efektif

dalam mencapai tujuan, dikarenakan persentase nilai kurang dari 100%.

Sedangkan pengukuran efektivitas program perlindungan dan jaminan sosial tahun 2021, sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Efektivitas} &= \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\% \\ &= \frac{68\%}{94\%} \times 100\% \\ &= 72\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil pengukuran efektivitas pada program perlindungan dan jaminan sosial tahun 2021 memperoleh nilai sebesar 72%. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program perlindungan dan jaminan sosial tergolong belum efektif dalam mencapai tujuan, dikarenakan menghasilkan persentase nilai kurang dari 100%.

c. Program rehabilitasi sosial

1) Ekonomis

Pengukuran kinerja keuangan dari segi ekonomis pada tahun 2020 dan 2021 untuk program rehabilitasi sosial dapat diukur dengan anggaran dan realisasi berikut:

Tabel IV.11
Realisasi Anggaran Program Rehabilitasi Sosial

Program	2020		2021	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Rehabilitasi Sosial	Rp 516.230.000	Rp 481.477.200	Rp 200.444.200	Rp 196.701.100

Sumber: Diolah dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara

Berdasarkan tabel IV. 11 maka dapat diketahui pengukuran dari segi ekonomis pada program rehabilitasi sosial tahun 2020, yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Ekonomis} &= \frac{\text{Input}}{\text{Input Value}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp } 481.477.200}{\text{Rp } 516.230.000} \times 100\% \\ &= 93\%\end{aligned}$$

Maka dapat diketahui bahwa seluruh dari pelaksanaan kegiatan program rehabilitasi sosial pada tahun 2020 mencapai nilai ekonomis sebesar 93%, sehingga masuk dalam kategori ekonomis karena hasil pengukuran yang lebih kecil dari 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dari program ini mampu meminimalisir anggaran dan sudah mampu dalam mengelola anggaran dengan baik.

Sedangkan pada tahun 2021 pengukuran dari segi ekonomis untuk program rehabilitasi sosial, yaitu:

$$\begin{aligned}\text{Ekonomis} &= \frac{\text{Input}}{\text{Input Value}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp } 196.701.100}{\text{Rp } 200.444.200} \times 100\% \\ &= 98\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil pengukuran ekonomis dari pelaksanaan kegiatan program rehabilitasi sosial tahun 2021 mencapai nilai sebesar 98%, sehingga masuk dalam kategori ekonomis karena hasil pengukuran yang lebih kecil dari 100%. Hal

ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dari program ini mampu meminimalisir anggaran yang terhindar dari pemborosan dan sudah mencapai kinerja yang baik dalam mengelola anggaran.

2) Efisiensi

Pengukuran kinerja keuangan dari segi efisiensi pada tahun 2020 dan 2021 untuk program rehabilitasi sosial dapat diukur dengan capaian kinerja berikut:

Tabel IV.12
Pencapaian Kinerja Program Rehabilitasi Sosial

Program	2020			2021		
	Target	Realisasi	Output	Target	Realisasi	Output
Rehabilitasi Sosial	100%	96%	96%	100%	73%	73%

Sumber: Diolah dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara

Berdasarkan tabel IV. 12 maka dapat diketahui pengukuran dari segi efisiensi pada tahun 2020, yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Efisiensi} &= \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\% \\
 &= \frac{96\%}{93\%} \times 100\% \\
 &= 103\%
 \end{aligned}$$

Maka dapat diketahui hasil dari pengukuran efisiensi untuk pelaksanaan kegiatan program rehabilitasi sosial pada tahun 2020 mencapai tingkat nilai efisiensi sebesar 103%. Adapun kategori persentase penilaian pada program rehabilitasi sosial tergolong efisiensi, karena hasil persentase lebih dari 100%. Maka ini membuktikan bahwa pelaksanaan dari program ini mampu

menghasilkan kegiatan yang sesuai target dan mampu dalam hal menghemat anggaran.

Sedangkan pada tahun 2021 pengukuran dari segi efisiensi untuk program rehabilitasi sosial, yaitu:

$$\begin{aligned}\text{Efisiensi} &= \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\% \\ &= \frac{73\%}{98\%} \times 100\% \\ &= 74\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi pada tahun 2021 dari pelaksanaan kegiatan program rehabilitasi sosial mencapai tingkat nilai efisiensi sebesar 74%. Adapun kategori persentase penilaian pada program rehabilitasi sosial tergolong belum efisiensi karena hasil persentase kurang dari 100%. Maka ini membuktikan bahwa pelaksanaan dari program ini belum mampu menghasilkan kegiatan yang sesuai target, meskipun mampu dalam hal menghemat anggaran.

3) Efektivitas

Hasil uji validitas dan reliabilitas pada program rehabilitasi sosial mendapat nilai *cronbach's alpha* sebesar 0,917 yang menyatakan bahwa kuesioner reliabel. Sedangkan untuk melihat pernyataan yang valid dilihat dari $r_{hitung} > r_{tabel}$. Adapun r_{hitung} dilihat dari hasil *pearson correlation*, dan r_{tabel} senilai 0,3338. Sehingga dari pernyataan kuesioner dinyatakan valid. Berdasarkan

data tersebut dapat ditentukan tingkat kepuasan publik, yaitu dengan mencari interval terlebih dahulu menggunakan rumus:

$$\text{Interval} = (\text{IK maks} - \text{IK min}) : 5$$

$$\text{IK maks} = R \times \text{PP} \times \text{EX maks}$$

$$= 35 \times 10 \times 5$$

$$= 1.750$$

$$\text{IK min} = R \times \text{PP} \times \text{EX min}$$

$$= 35 \times 10 \times 1$$

$$= 350$$

$$\text{Interval} = (1.750 - 350) : 5$$

$$= 280$$

Setelah itu dilakukan pengukuran klasifikasi intensitas dengan metode distribusi yang menghasilkan 4 responden merasa sangat puas terhadap kinerja pada program rehabilitasi sosial, 4 responden yang merasa puas, 17 responden yang merasa kurang puas, 3 responden yang merasa tidak puas, dan 7 responden yang merasa sangat tidak puas. Kemudian dapat diperoleh interval kepuasan masyarakat, yaitu sebagai berikut:

Tabel IV.13
Interval Kepuasan Masyarakat

Interval	Kategori
350-629	Sangat Tidak Puas
630-909	Tidak Puas
910-1.189	Kurang Puas
1.190-1.469	Puas
1.470-1.750	Sangat Puas

Indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh dari penyebaran kuesioner diketahui dari jumlah total pernyataan yaitu 1.273, yang berarti berada pada kategori puas. Maka untuk mengetahui persentase pencapaian *outcome* ditentukan dengan rumus:

$$\begin{aligned}\text{Nilai Outcome} &= \frac{\text{IKM}}{\text{IK MAKS}} \times 100\% \\ &= \frac{1.273}{1.750} \times 100\% \\ &= 73\%\end{aligned}$$

Setelah diketahui nilai *outcome*, akan dapat diperoleh nilai efektivitas dari program rehabilitasi sosial tahun 2020, yaitu:

$$\begin{aligned}\text{Efektivitas} &= \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\% \\ &= \frac{73\%}{96\%} \times 100\% \\ &= 76\%\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan efektivitas pada program rehabilitasi sosial tahun 2020 memperoleh nilai sebesar 76%. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program rehabilitasi sosial tergolong belum efektif dalam mencapai tujuan, karena hasil pengukuran yang kurang dari 100%.

Sedangkan pengukuran efektivitas pada program rehabilitasi sosial tahun 2021, yaitu:

$$\begin{aligned}\text{Efektivitas} &= \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\% \\ &= \frac{73\%}{73\%} \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan efektivitas pada program rehabilitasi sosial tahun 2021 memperoleh nilai sebesar 100%. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program rehabilitasi sosial tergolong efektif berimbang dalam mencapai tujuan, karena hasil pengukuran yang sama dengan 100%.

C. Pembahasan Hasil penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *value for money* untuk menilai kinerja keuangan Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara. *Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis dalam meminimalisir anggaran yang terhindar dari pemborosan, efisiensi dalam mencapai *output* yang maksimum dengan penggunaan *input* yang minim, dan efektif dalam mencapai sasaran sesuai rencana.

Penelitian ini menggunakan uji validitas dan reliabilitas terhadap kuesioner yang disebarkan kepada responden untuk memenuhi dan mengukur data hasil penelitian yang digunakan, serta untuk menganalisis kinerja keuangan dinas sosial menggunakan konsep *value for money*, yaitu dari segi efektivitas pada program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial, serta rehabilitasi sosial. Berikut pembahasan mengenai hasil penelitian dari pengukuran kinerja keuangan menggunakan konsep *value for money* pada kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara, yaitu:

1. Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Berdasarkan analisis dan perhitungan pada program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin tahun 2020, menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatannya mampu meminimalisir dana sebesar Rp 36.892.000, dari anggaran yang diperoleh sebesar Rp 412.404.600, dan sudah direalisasikan sebesar Rp 375.512.600. Sehingga pengukuran yang dilakukan terhadap anggaran pada program tersebut menghasilkan nilai persentase di bawah 100%, yaitu sebesar 91%. Sehingga masuk dalam kategori ekonomis dalam mengelola anggaran. Sedangkan tahun 2021 dinas sosial mampu meminimalisir anggaran sebesar Rp 17.974.000 dari anggaran yang diperoleh sebesar Rp 293.297.200, dan sudah direalisasikan sebesar Rp 275.323.200. Pengukuran yang dilakukan terhadap anggaran pada program tersebut menghasilkan nilai persentase di bawah 100%, yaitu sebesar 94%. Sehingga masuk dalam kategori ekonomis dalam mengelola anggaran.

Program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin memperoleh nilai pengukuran efisiensi pada tahun 2020, yaitu dengan persentase 110%. Sedangkan pada tahun 2021 memperoleh persentase 106%. Hasil pengukuran ini menunjukkan bahwa memperoleh nilai persentase melebihi dari 100%. Maka dalam pelaksanaan kegiatannya tergolong efisiensi, sehingga dikatakan mampu dalam mengelola dana, dan jika dilihat dari kegiatannya semua dapat terlaksana sesuai rencana.

Tingkat efektivitas diukur dari sasaran dinas sosial, yaitu penilaian masyarakat penerima bantuan. Maka hasil dari pengukuran pada program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin tahun 2020 dan 2021 memperoleh tingkat persentase 71% yang masuk dalam kategori belum efektif dalam mencapai tujuan. Hal ini terjadi karena hasil pengukuran yang masih memperoleh nilai persentase kurang dari 100%.

2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program perlindungan dan jaminan sosial tahun 2020 memperoleh tingkat nilai persentase 96%. Sehingga program ini masuk dalam kategori ekonomis, karena hasil pengukuran yang kurang dari 100%, dan mampu meminimalisir anggaran sebesar Rp 6.258.800, dari anggaran yang diperoleh sebesar Rp 150.089.500, dan sudah direalisasikan sebesar Rp 143.830.700. Sedangkan pada tahun 2021 pengukuran dari segi ekonomis mencapai 91%. Maka dapat dikatakan bahwa program perlindungan dan jaminan sosial masuk dalam kategori ekonomis, karena hasil pengukuran lebih kecil dari 100% dan mampu meminimalisir dana sebesar Rp 38.969.000, dari anggaran yang diperoleh sebesar Rp 453.369.800, dan sudah direalisasikan sebesar Rp 414.400.800.

Pengukuran dari segi efisiensi pada program perlindungan dan jaminan sosial tahun 2020 memperoleh nilai persentase 100%, yang masuk dalam kategori efisiensi berimbang, karena hasil pengukuran yang sama dengan 100%. Sehingga kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan. Sedangkan pada tahun 2021 memperoleh persentase 103%.

Maka program ini tergolong efisiensi, karena hasil pengukuran yang lebih besar dari 100%. Sehingga dapat dikatakan program perlindungan dan jaminan sosial pada tahun 2021 mampu melaksanakan kegiatan dengan pengelolaan keuangan yang baik.

Pengukuran dari segi efektivitas pada kegiatan yang dilakukan dinas sosial untuk program perlindungan dan jaminan sosial menghasilkan nilai persentase di bawah 100%, yaitu pada tahun 2020 mencapai nilai 71%. Sedangkan pada tahun 2021 mencapai nilai 72%. Maka dapat dikatakan bahwa program ini belum efektif dalam mencapai tujuan.

3. Program Rehabilitasi Sosial

Pelaksanaan pada program rehabilitasi sosial tahun 2020 mencapai nilai ekonomis 93% dengan anggaran yang diperoleh sebesar Rp 516.230.000, sedangkan anggaran yang sudah direalisasikan sebesar Rp 481.477.200, sehingga kegiatan dari program ini mampu meminimalisir anggaran sebesar Rp 34.752.800 dan masuk dalam kategori ekonomis, karena hasil pengukuran yang lebih kecil dari 100%. Sedangkan pada tahun 2021, dinas sosial mendapatkan anggaran sebesar Rp 200.444.200 dan sudah direalisasikan sebesar Rp 196.701.100, maka dinas sosial mampu meminimalisir anggaran sebesar Rp 3.743.100. Kinerja keuangan pada program rehabilitasi sosial masuk dalam kategori ekonomis, karena hasil pengukuran yang lebih kecil dari 100%, yaitu 98% yang berarti mampu dalam meminimalisir anggaran.

Adapun pengukuran dari segi efisiensi yang dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara pada program rehabilitasi sosial tahun 2020 memperoleh tingkat persentase 103%, yang berarti masuk dalam kategori efisiensi dalam melaksanakan kegiatan. Hal ini terjadi karena pengukuran efisiensi yang lebih besar dari 100%. Sedangkan pada tahun 2021 mencapai 74%, yang berarti belum efisien, karena adanya beberapa sub kegiatan yang belum terlaksana sesuai rencana, dan hasil pengukuran yang lebih kecil dari 100%.

Kegiatan yang dilakukan dinas sosial pada program rehabilitasi sosial tahun 2020 menghasilkan nilai persentase 76%. Sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan pada program ini belum berjalan secara efektif dalam mencapai tujuan, karena hasil pengukuran yang kurang dari 100%. Sedangkan pada tahun 2021 mencapai nilai 100% yang berarti efektif berimbang. Sehingga dikatakan bahwa kegiatan yang sudah direncanakan dapat direalisasikan sesuai rencana, karena hasil pengukuran yang sama dengan 100%.

D. Keterbatasan Penelitian

Seluruh rangkaian kegiatan dalam penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan. Namun untuk mendapatkan hasil yang sempurna sangatlah sulit, sebab dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat berbagai keterbatasan, diantaranya:

1. Keterbatasan penelitian ini hanya membahas mengukur kinerja keuangan dari tiga kegiatan, yaitu program pemberdayaan sosial dan penanganan

fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial, dan rehabilitasi sosial yang diukur menggunakan konsep *value for money*.

2. Peneliti tidak mampu mengontrol semua responden dalam menjawab kuesioner yang diberi, apakah responden memang serius atau tidak dalam mengisi kuesioner.
3. Dalam menyebarkan kuesioner ada saja responden yang menolak untuk mengisinya, dikarenakan takut dan kurang percaya akan data yang disalahgunakan.
4. Meskipun demikian, peneliti tetap berusaha agar keterbatasan yang dihadapi tidak mengurangi makna maupun hasil penelitian. Sehingga dengan segala upaya dan bantuan semua pihak skripsi ini dapat terselesaikan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pengukuran kinerja keuangan Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas

Utara menggunakan konsep *value for money* pada program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin tahun 2020-2021 memperoleh hasil pengukuran ekonomis lebih kecil dari 100%, sehingga masuk dalam kategori ekonomis dan dinyatakan mampu meminimalisir anggaran. Kemudian untuk pengukuran efisiensi tahun 2020-2021 memperoleh hasil lebih besar dari 100%, sehingga masuk dalam kategori efisiensi dalam menghasilkan *output*. Sedangkan pengukuran efektivitas tahun 2020-2021 dinyatakan belum dapat mencapai efektivitas dengan baik, karena hasil pengukuran yang kurang dari 100%.

2. Pengukuran kinerja keuangan Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas

Utara menggunakan konsep *value for money* pada program perlindungan dan jaminan sosial tahun 2020-2021 memperoleh hasil pengukuran ekonomis lebih kecil dari 100%, sehingga masuk dalam kategori ekonomis dan dinyatakan mampu meminimalisir anggaran. Kemudian untuk pengukuran efisiensi tahun 2020 memperoleh hasil yang sama dengan 100%, sehingga masuk dalam kategori efisiensi berimbang dalam menghasilkan *output*. Sedangkan tahun 2021 memperoleh hasil

pengukuran yang lebih besar dari 100%, sehingga tergolong efisiensi dalam menghasilkan *output*. Selanjutnya untuk pengukuran efektivitas tahun 2020-2021 dinyatakan belum dapat mencapai efektivitas dengan baik, karena hasil pengukuran yang kurang dari 100%.

3. Pengukuran kinerja keuangan Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara menggunakan konsep *value for money* pada program rehabilitasi sosial tahun 2020-2021 memperoleh hasil pengukuran ekonomis di bawah 100%, sehingga masuk dalam kategori ekonomis dan dinyatakan mampu meminimalisir anggaran. Kemudian untuk pengukuran efisiensi menghasilkan pengukuran yang bervariasi, yaitu pada tahun 2020 memperoleh hasil lebih dari 100%, sehingga masuk dalam kategori efisiensi dalam menghasilkan *output*. Sedangkan tahun 2021 memperoleh hasil kurang dari 100%, sehingga dikatakan belum efisiensi dalam menghasilkan *output*. Hal ini juga terjadi pada pengukuran efektivitas tahun 2020 yang dinyatakan belum dapat mencapai efektivitas dengan baik, karena hasil pengukuran yang kurang dari 100%. Namun pada tahun 2021 memperoleh hasil pengukuran yang sama dengan 100%, sehingga masuk dalam kategori efektivitas berimbang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk instansi sektor publik khususnya dinas sosial agar mampu menghasilkan kinerja yang lebih ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, serta bisa membuat strategi kegiatan yang lebih banyak dibutuhkan oleh masyarakat, menjalankan program yang tepat sasaran sesuai rencana, dan mampu dalam mengelola maupun meminimalisir anggaran.
2. Untuk peneliti selanjutnya agar lebih mengembangkan penelitian ini menjadi lebih luas, seperti data yang lebih banyak dalam mengukur kegiatan-kegiatan dinas sosial, dan lebih luas dalam mengambil sampel untuk mengukur efektivitas, sehingga hasil penelitian menunjukkan hasil yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, *Teori Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik dari Anggaran hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah hingga Tempat Ibadah*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Abdul Hamid dan Ilyas Lamuda, Evaluasi Kinerja Keuangan Melalui Pendekatan Value For Money Gorontalo, *Accounting Journal*, Vol. 02, No. 1, April 2019.
- Abdul Nasser Hasibuan, dkk., Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan, *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 2, Desember 2019.
- Abdul Nasser Hasibuan, *Akuntansi Keuangan Menengah*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Ahmad Nizar Rangkuti, *Statistik untuk Penelitian Pendidikan*, Bandung: Citapustaka Media, 2014.
- Ali Mutasowifin, *Intisari Analisis Kinerja Keuangan*, Bogor: Mahameru Publishing House, 2014.
- Anik Yuesti, dkk., *Akuntansi Sektor Publik*, Bali: CV. Noah Aletheia, 2020.
- Ayu Septiana, Dewi Susilowati, dkk., Standar Pelayanan Minimal, https://www.academia.edu/37796665/STANDAR_PELAYANAN_MINIMAL_SPM_STANDAR_PELAYANAN_MINIMAL_SPM_, 17 Oktober 2021.
- Beby Nurtesha Putri, Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kubu Raya, *Jurnal Akuntansi Maranatha*, Vol. 11, No. 2, November 2019.
- Budi Darma, *Statistika Penelitian Menggunakan SPSS*, Jakarta: Guepedia, Agustus 2021.
- Dwi Purwiyanti, Analisis Kinerja Berbasis Konsep Value For Money pada Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi, *e Jurnal Katalogis*, Vol. 5, No. 3, Maret 2017.
- Elidawaty Purba, dkk., *Metode Penelitian Ekonomi*, Pematangsiantar: Yayasan Kita Menulis, Juni 2021.
- Erasma Fitilai Zalog dan Progresif Buulolo, Analisis Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan dengan Pendekatan Value For Money Periode 2018, 19 September 2020.
- Fitriani, Analisis Value For Money dalam Pengukuran Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017.

- Francis Hutabarat, *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan*, Banten: Desanta Multiavisitama, 2020.
- Gabriela Thalia wuwungan, dkk., Penerapan Metode Value For Money Sebagai Tolak Ukur Penilaian Kinerja Keuangan pada Organisasi Sektor Publik di Dinas Kesehatan Kota Manado, *Jurnal Riset Akuntansi*, 14 April 2019.
- Habib Muhsin Syafingi, Konstitusionalitas Standar Pelayanan Minimal, *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 8, No. 2, Agustus 2017.
- Halkadri Fitra, *Analisis Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah*, Purwokerto: CV. IRDH, 2019.
- Handoko A. Hasthoro dan Sunardi, Tata Kelola Publik dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 19, No. 1, April 2016.
- Hery, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014.
- <https://setdakab.padanglawaskab.go.id/wp-content/uploads/2016/11/perda-pp-18>, 20 Mei 2022.
- <https://padanglawasutarakab.go.id/read/9/sejarah-padang-lawas-utara>, 20 Mei 2022.
- Isna Ardila dan Ayu Anindya Putri, Analisis Kinerja Keuangan dengan Pendekatan Value For Money pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 15, No. 1, Maret 2015.
- Jamaluddin Majid, *Akuntansi Sektor Publik*, Gowa: Pusaka Almaida, November 2019.
- Jenefer Hermina Worotikan, dkk., Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa, *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol. 13, No. 4, 2018.
- Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf An-Nur Al-Qur'anul Karim*, Jakarta Timur: Maktabah Al- Fatih, 2015.
- Laporan Indikator Belanja Langsung Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021.
- M. Ramadhani, dkk., Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Banjarmasin, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 11, Maret 2016.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 5, Cilandak Timur: Lentera Hati, 2002.

- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 7, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 9, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 13, Pisangan Ciputat: Lentera Hati, 2012.
- Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: UII Press, Maret 2016.
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi, 2018.
- Marsella Lasut, Evaluasi Pelaksanaan Sistem Akuntansi Belanja pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan Sesuai PP No 71 Tahun 2010, *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 12, No. 2, 2017.
- Martinus Syamsudin, Implementasi Standar Pelayanan Minimal Masyarakat Desa Ujung Kempas Kecamatan Ketungau Hulu, *Fokus*, Vol. 19, No. 1, Maret 2021.
- Meriyatus Sofiani dan Endang Dwi Retnani, Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Surabaya, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 8, No. 11, November 2019.
- Mohamad Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Tangerang: Universitas Terbuka, 2019.
- Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013.
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Ni Ketut Riani, Strategi Peningkatan Pelayanan Publik, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 1, No. 11, April 2021.
- Nunuy Nur Afiah, dkk., *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual pada Entitas Akuntansi*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Nurhamida, Wawancara dengan Masyarakat Penerima Bantuan Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara, 5 Desember 2021.
- Nur Zeni Amilia Putri, Analisis Value For Money pada Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020.
- Ongku Bangsawan, Wawancara dengan Kepala Dinas Sosial di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara, 6 Desember 2021.

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Analisis atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, <https://peraturanpedia.id/permenpan-rb-nomor-53-tahun-2014/>, 8 Maret 2022.
- Putri Ariella Belinda dan Nevi Costari, Pentingnya Implementasi Akuntansi Sektor Publik dalam Suatu Instansi Pemerintahan, *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Rahmat Tantowi, Standar Pelayanan Minimal Sebagai Strategi dalam Meningkatkan Pelayanan Publik, *Jurnal Samudra Ekonomika*, Vol. 3, No. 2, 2019.
- Rochmat Aldy Purnomo, *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan SPSS*, Ponorogo: CV. Wade Group, 2016.
- Rusdiani dan Nasihudin, Akuntabilitas Kinerja Penelitian, Bandung: Pusat Penelitian dan UIN SGD Bandung, Agustus 2018.
- Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Kediri: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: CV. Alfabeta, Maret 2012.
- Surajiyo, dkk., *Penelitian Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Teresia Atikapuspa Wardhani, Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pendekatan Value For Money, *Skripsi*, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2017.
- Tiarona, Wawancara dengan Masyarakat Penerima Bantuan Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara, 5 Desember 2021.
- Tim KPPOD, *Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia*, 2002.
- Triniyati, Analisis Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun dengan Pendekatan *Value For Money* Periode Tahun 2015-2017, *Skripsi*, Universitas Negeri Sumatera Utara Medan, 2018.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 18 Ayat 2 Tentang Pemerintah Daerah, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>, 7 Maret 2022.
- Wiryawan Wira, Analisis Kinerja Keuangan pada Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bintan dengan Menggunakan Konsep Value For Money, 2012.

Yosie Dwinanda, Analisis Value For Money dalam Pengukuran Kinerja pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, *Skripsi*, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2018.

Zaenal Mukarom dan Muhibudin Wijaya Laksana, *Membangun Kinerja Pelayanan Publik Menuju Clean Government and Good Governance*, Bandung: Pustaka Setia, Februari 2016.

Daftar Riwayat Hidup

Data Pribadi

Nama : Fanisah Yuliyanda
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 11 Juli 2000
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Anak ke : 3 dari 3 bersaudara
Alamat lengkap : Jl. Ompunapotar, Gg Durian, kel. Panyanggar
Telepon/hp : 081360497349

Orang Tua

Nama Orang Tua
Ayah : Alm. Aswir Harahap
Ibu : Nursaima Siregar
Alamat : Jl. Ompunapotar, Gg Durian, kel. Panyanggar
Pekerjaan Orang Tua
Ayah : -
Ibu : Petani
Motto hidup : “Kerja keras akan mengalahkan orang berbakat ketika orang berbakat tidak bekerja keras”

Latar Belakang Pendidikan

Tahun 2006-2012 : SDN 200112 Panyanggar
Tahun 2012-2015 : MTSN 1 Padangsidempuan
Tahun 2015-2018 : SMKN 1 Padangsidempuan
Tahun 2018 sampai sekarang : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan

Addary Padangsidempuan

KUSIONER
ANALISIS KINERJA KEUANGAN MENGGUNAKAN KONSEP *VALUE*
***FOR MONEY* PADA KEGIATAN DINAS SOSIAL**
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Kepada Yth:

Bapak/Ibu

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan Hormat,

Saya Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (IAIN) Padangsidempuan melakukan penelitian dengan judul **Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Konsep *Value For Money* pada Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara**. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui *outcome* dan respon masyarakat terhadap program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara. Maka dibutuhkan pendapat dari responden untuk melengkapi data dan informasi penelitian ini.

Untuk itu saya mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu agar mengisi kuisisioner yang saya berikan. Atas bantuan dan kesediaannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Padangsidempuan, April 2022

Fanisah Yulianda
NIM. 18 402 00121

UESIONER (ANGKET) PENELITIAN

ANALISIS KINERJA KEUANGAN MENGGUNAKAN KONSEP *VALUE FOR MONEY* PADA KEGIATAN DINAS SOSIAL KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

A. Identitas Responden

Nama :
Jenis kelamin :
Alamat :
Usia :
Pekerjaan :
Penghasilan/bulan :

B. Petunjuk Pengisian

1. Berilah *checklis* (✓) pada setiap jawaban Bapak/Ibu yang dianggap paling benar. Jawaban dinyatakan dalam pilihan skala 1-5 yang memiliki makna:
 - a. SP = Sangat Puas (5)
 - b. P = Puas (4)
 - c. KP = Kurang Puas (3)
 - d. TP = Tidak Puas (2)
 - e. STP = Sangat Tidak Puas (1)
2. Mohon memberikan jawaban yang sebenarnya karena tidak akan mempengaruhi Bapak/Ibu sebagai anggota PMKS
3. Terima kasih atas partisipasi dan waktunya.

Padangsidempuan, April 2022

Responden

()

C. Daftar Pernyataan Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

No.	Pernyataan	SP	P	KP	TP	STP
1	Dinas sosial memberikan pelayanan sesuai kebutuhan penyandang masalah kesejahteraan sosial					
2	Masyarakat mudah untuk mendapatkan pelayanan dalam mengurus dokumen atau berkas persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan bantuan					
3	Petugas dinas sosial memberikan pelayanan dengan komunikasi yang baik, ramah, dan sopan					
4	Petugas dinas sosial tidak membedakan kedudukan, status sosial, dan jenis sosial dalam memberikan bantuan atau pelayanan sosial					
5	Dinas sosial memberikan pelatihan keterampilan bagi yang tidak memiliki pekerjaan					
6	Dinas sosial memberikan sarana dan prasarana bagi masyarakat dalam membantu menjalankan aktivitas					
7	Proses penyaluran bantuan dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan					
8	Petugas dinas sosial melakukan kunjungan secara rutin dalam mengadakan pembinaan atas perkembangan masyarakat penerima bantuan					
9	Dinas sosial membantu memberikan solusi mengenai masalah ekonomi dalam penanganan fakir miskin					
10	Program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin membantu dalam mensejahterakan masyarakat					

C. Daftar Pernyataan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

No.	Pernyataan	SP	P	KP	TP	STP
1	Dinas sosial memberikan pelayanan sesuai kebutuhan penyandang masalah kesejahteraan sosial					
2	Masyarakat mudah untuk mendapatkan pelayanan dalam mengurus dokumen atau berkas persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan bantuan					
3	Petugas dinas sosial memberikan pelayanan dengan komunikasi yang baik, ramah, dan sopan					
4	Petugas dinas sosial tidak membedakan kedudukan, status sosial, dan jenis sosial dalam memberikan bantuan atau pelayanan sosial					
5	Dinas sosial memberikan pelatihan keterampilan bagi yang tidak memiliki pekerjaan					
6	Dinas sosial memberikan sarana dan prasarana bagi masyarakat dalam membantu menjalankan aktivitas					
7	Proses penyaluran bantuan dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan					
8	Petugas dinas sosial melakukan kunjungan secara rutin dalam mengadakan pembinaan atas perkembangan masyarakat penerima bantuan					
9	Dinas sosial membantu memberikan solusi mengenai masalah ekonomi dalam memberikan perlindungan dan jaminan sosial terhadap masyarakat					
10	Program perlindungan dan jaminan sosial membantu dalam mensejahterakan masyarakat					

C. Daftar Pernyataan Program Rehabilitasi Sosial

No.	Pernyataan	SP	P	KP	TP	STP
1	Dinas sosial memberikan pelayanan sesuai kebutuhan penyandang masalah kesejahteraan sosial					
2	Masyarakat mudah untuk mendapatkan pelayanan dalam mengurus dokumen atau berkas persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan bantuan					
3	Petugas dinas sosial memberikan pelayanan dengan komunikasi yang baik, ramah, dan sopan					
4	Petugas dinas sosial tidak membedakan kedudukan, status sosial, dan jenis sosial dalam memberikan bantuan atau pelayanan sosial					
5	Dinas sosial memberikan pelatihan keterampilan bagi yang tidak memiliki pekerjaan					
6	Dinas sosial memberikan sarana dan prasarana bagi masyarakat dalam membantu menjalankan aktivitas					
7	Proses penyaluran bantuan dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan					
8	Petugas dinas sosial melakukan kunjungan secara rutin dalam mengadakan pembinaan atas perkembangan masyarakat penerima bantuan					
9	Dinas sosial membantu memberikan solusi mengenai masalah ekonomi dalam merehabilitasi masalah sosial di masyarakat					
10	Program rehabilitasi sosial membantu dalam mensejahterakan masyarakat					

SURAT VALIDASI ANGKET

Menerangkan bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ja'far Nasution, M.E.I.

NIDN : 2004088205

Telah memberikan pengamatan dan masukan terhadap angket untuk kelengkapan penelitian yang berjudul: **“Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Konsep *Value For Money* pada Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara”**.

Yang disusun oleh:

Nama : Fanisah Yuliyanda

Nim : 18 402 00121

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi : Ekonomi Syariah

Adapun masukan saya adalah sebagai berikut:

1.
2.
3.

Dengan harapan masukan dan penilaian yang saya berikan dapat dipergunakan untuk menyempurnakan dan memperoleh kualitas angket yang baik.

Padangsidimpuan, 25 April 2022

Validator

**Ja'far Nasution, M.E.I.
NIDN. 2004088205**

LEMBAR VALIDASI
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN
PENANGANAN FAKIR MISKIN

Petunjuk:

1. Kami mohon kiranya Bapak/Ibu memberikan penilaian ditinjau dari aspek soal-soal yang kami susun.
2. Beri tanda *checklist* (√) pada kolom V (Valid), VR (Valid dengan Revisi) dan TV (Tidak Valid) pada tiap butir soal.
3. Untuk revisi Bapak/Ibu dapat langsung menuliskannya pada naskah yang perlu direvisi atau menuliskannya pada kolom saran yang kami berikan.
4. Lembar soal terlampir.

Nomor	Indikator Penelitian	Item Soal	Jumlah
1	Pemberian bantuan bagi penyandang masalah sosial sesuai dengan masalah kesejahteraan sosial	1	1
2	Pelayanan yang diberikan oleh dinas sosial terhadap masyarakat	2, 3, 4	3
3	Program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin bisa dirasakan langsung oleh masyarakat	5, 6, 7, 8	4
4	Menimbulkan kesejahteraan masyarakat dalam menjalani kehidupan	9, 10	2
Total			10

Catatan:

.....
.....
.....
.....
.....

Padangsidimpuan, 25 April 2022

Validator

Ja'far Nasution, M.E.I.
NIDN. 2004088205

LEMBAR VALIDASI
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Petunjuk:

1. Kami mohon kiranya Bapak/Ibu memberikan penilaian ditinjau dari aspek soal-soal yang kami susun.
2. Beri tanda *checklist* (✓) pada kolom V (Valid), VR (Valid dengan Revisi) dan TV (Tidak Valid) pada tiap butir soal.
3. Untuk revisi Bapak/Ibu dapat langsung menuliskannya pada naskah yang perlu direvisi atau menuliskannya pada kolom saran yang kami berikan.
4. Lembar soal terlampir.

Nomor	Indikator Penelitian	Item Soal	Jumlah
1	Pemberian bantuan bagi penyandang masalah sosial sesuai dengan masalah kesejahteraan sosial	1	1
2	Pelayanan yang diberikan oleh dinas sosial terhadap masyarakat	2, 3, 4	3
4	Program perlindungan dan jaminan sosial bisa dirasakan langsung oleh masyarakat	5, 6, 7, 8	1
5	Menimbulkan kesejahteraan masyarakat dalam menjalani kehidupan	9, 10	1
Total			7

Catatan:

.....
.....
.....

Padangsidimpuan, 25 April 2022

Validator

Ja'far Nasution, M.E.I.
NIDN. 2004088205

LEMBAR VALIDASI REHABILITASI SOSIAL

Petunjuk:

1. Kami mohon kiranya Bapak/Ibu memberikan penilaian ditinjau dari aspek soal-soal yang kami susun.
2. Beri tanda *checklist* (✓) pada kolom V (Valid), VR (Valid dengan Revisi) dan TV (Tidak Valid) pada tiap butir soal.
3. Untuk revisi Bapak/Ibu dapat langsung menuliskannya pada naskah yang perlu direvisi atau menuliskannya pada kolom saran yang kami berikan.
4. Lembar soal terlampir.

Nomor	Indikator Penelitian	Item Soal	Jumlah
1	Pemberian bantuan bagi penyandang masalah sosial sesuai dengan masalah kesejahteraan sosial	1	1
2	Pelayanan yang diberikan oleh dinas sosial terhadap masyarakat	2, 3, 4	3
4	Program rehabilitasi sosial bisa dirasakan langsung oleh masyarakat	5, 6, 7, 8	1
5	Menimbulkan kesejahteraan masyarakat dalam menjalani kehidupan	9,10	1
Total			7

Catatan:

.....
.....
.....

Padangsidempuan, 25 April 2022

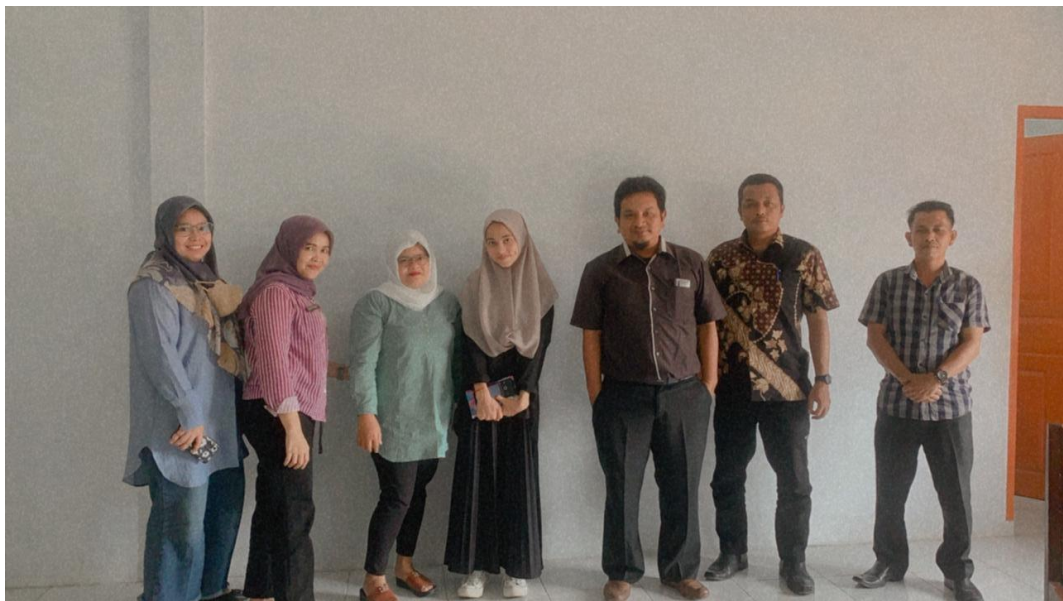
Validator

Ja'far Nasution, M.E.I.
NIDN. 2004088205

Dokumentasi dengan Masyarakat Penerima Bantuan Sosial



Dokumentasi dengan Pihak Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara



Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan Program Tahun 2020-2021

No.	Program	2020		2021	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Rp 412.404.600	Rp 375.512.600	Rp 293.297.200	Rp 275.323.200
2	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 150.089.500	Rp 143.830.700	Rp 453.369.800	Rp 414.400.800
3	Program Rehabilitasi Sosial	Rp 516.230.000	Rp 481.477.200	Rp 200.444.200	Rp 196.701.100

Target Capaian Kinerja Tahun 2020-2021

No.	Program	2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	100%	100%	100%	100%
2	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%	96%	100%	94%
3	Program Rehabilitasi Sosial	100%	96%	100%	73%



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0834) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 2677 /In.14/G.1/G.4c/TL.00/11/2021
Hal : Mohon Izin Pra Riset

15 Nopember 2021

Yth. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama	: Fanisah Yuliyanda
NIM	: 1840200121
Semester	: VII (Tujuh)
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Konsep Value For Money pada Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara (Studi Kasus Kantor Dinas Sosial Padang Lawas Utara)".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
DINAS SOSIAL

JL. LINTAS GUNUNG TUA - LANGGA PAYUNG KM. 3 GUNUNG TUA KODE POS 22753
GUNUNG TUA

Nomor : 460/ 472 /2021
Tingkat : Penting
Materi : -
Substansi : Izin Pra Riset

Gunung Tua, 22 Nopember 2021

Kepada Yth :
Bapak Pimpinan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis IAIN
Padang Sidimpuan

Di -
Tempat

Menindaklanjuti surat dari Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nomor: 2677/ In.14/ G.1/ G.4c/ TL.00/ 11/2021 Tanggal 15 Nopember 2021, Hal Mohon Izin Pra Riset.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, bersama surat ini kami sampaikan kepada Bapak bahwasanya Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara memberikan izin riset dan data kepada mahasiswa tersebut.

Demikian yang dapat disampaikan dan diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA



ONGKU BANGSAWAN HASYIM, S.Sos
PEMBINA TK. I
NIP. 19640912 198503 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 1697 /In.14/G.1/G.4c/TL.00/06/2022
Hal : Mohon Izin Riset

10 Juni 2022

Yth. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Fanisah Yuliyanda
NIM : 1840200121
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Konsep Value For Money pada Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
DINAS SOSIAL
JL. LINTAS GUNUNGTUA - LANGGA PAYUNG KM. 3.5 GUNUNGTUA KODE POS 22753
GUNUNG TUA

SURAT KETERANGAN SELESAI MENILITI

Nomor : 460/247 /VI/Dinsos/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ONGKU BANGSAWAN HASYIM, S.Sos
No. P. : 19640912 198503 1 005
Jabatan : Kepala Dinas

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : FANISAH YULIYANDA
No. P. : 1840200121
Fak/Jur. : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Konsep Value For Money pada
Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara.

telah selesai melaksanakan penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara

demikian disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gunung Tua, Juni 2022

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

ONGKU BANGSAWAN HASYIM, S.Sos
PEMBINA DINAS SOSIAL
NIP. 19640912 198503 1 005





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 1353 /In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/04/2022
Lampiran : -
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

28 April 2022

Yth. Bapak/Ibu;

1. Abdul Nasser Hasibuan : Pembimbing I
2. Arti Damisa : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Fanisah Yuliyanda
NIM : 1840200121
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Konsep *Value For Money* pada Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara.

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak/Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.